

Integritas | Profesional | Inovatif | Peduli

STIABlitz

Edisi Mei - Agustus 2018

SeTIA Mengedukasi



STIA ERA 4.0

INFO KITA

Selamatkan "Jekardah" dari Jelantah

HIGHLIGHT

Mempertahankan *Sustainable Nationalism* melalui Formula *4Competencies* di Era *Disruptive Innovation 4.0*

ISSN. 2623-0496



1 **stSTIA**Blitz

SeTIA Mengedukasi

Susunan Redaksi

Pelindung

Dr. Makhdom Priyatno, MA

Penanggungjawab

Yogi Suwarno, Ph.D

Pembina

Dr. Augustin Rina Herawati, M.Si

Pimpinan Redaksi

Dr. Edy Sutrisno, M.Si

Redaktur Pelaksana

Retnayu Prasetyanti

Editor

Nila Kurnia Wati

Layouter

Fadly Dwi Saftayana Putra

Keisha Dinya Solihati

Martrisya Harikedua

Fotografer

Rindri Andewi Gati

Ayunda Zidafrican

Alamat Redaksi

STIA LAN Jakarta, Jalan Administrasi II,
Pejompongan, Jakarta Pusat, 10260

Salam Magistra!

Puji syukur kehadiran Tuhan YME atas limpahan rahmat untuk terus berkarya dan berinovasi, mendukung kemajuan bangsa dan negara. Dalam kesempatan kali ini, segenap sivitas akademika STIA LAN Jakarta, untuk pertama kalinya dan dengan penuh antusias menyapa para pembaca dari berbagai kalangan melalui Majalah STIA Blitz edisi perdana. Kehadiran STIA Blitz dirasa mampu menjadi ruang informatif dan edukatif sekaligus sarana interaksi bagi STIA LAN Jakarta dan masyarakat serta stakeholder dari beragam afiliasi.

STIA LAN Jakarta bersyukur atas berbagai kemajuan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian yang telah diraih STIA dalam beberapa tahun terakhir. Transformasi STIA LAN Jakarta sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terapan telah memberikan banyak dinamika perubahan dalam ranah pendidikan maupun tata kelola manajemen sumber daya organisasi.

Tim Redaksi berharap STIA Blitz dapat menjadi media yang mampu menjawab isu krusial; membantu meningkatkan budaya literasi, memberikan pelayanan informasi kepada publik, dan menampung publikasi penelitian dan pengabdian para sivitas akademika. Tak lupa, STIA Blitz juga berperan sebagai media pendukung fungsi transparansi institusi (selain website dan media sosial) yang dapat menjangkau masyarakat dan mendukung keterwujudan clean and open government.

Selamat membaca!

content

Edisi I Mei-Agustus 2018 – STIA Blitz

1

HIGHlite

Mempertahankan *Sustainable Nationalism* melalui Formula 4Competencies di Era *Disruptive Innovation 4.0*

3

AKADEMIKA

The 1st international conference on governance, public administration and social sciences



15

OPINI

Literasi Politik Menuju Tahun Demokrasi

24

PROfile



27

REVIEW

Troubled Transit: Asylum Seekers Stuck in Indonesia

30

KOLOM

Kerentanan Pondasi Ekonomi Negara Industri Pinggiran dalam Kerangkeng Disiplin Pasar Global

37

KATAmereka



42

ENGLISHCorner

45

INFOKita

Selamatkan "Jekardah" dari Jelantah

MEMPERTAHANKAN SUSTAINABLE NATIONALISM MELALUI FORMULA 4COMPETENCIES DI ERA DISRUPTIVE INNOVATION 4.0

"Revolusi Industri 4.0 bisa menjadi peluang dan ancaman, tidak hanya bagi kestabilan ekonomi, semangat nasionalisme milenial Indonesia juga tengah diuji"
(Joko Widodo dalam Presidential Lecture CPNS, 2018)



Pola digital economy, artificial intelligence, big data, robotic atau dikenal dengan fenomena disruptive innovation menjadi semakin masif di era revolusi industri 4.0. Base structure yang menjadi perhatian pemerintah adalah peningkatan kualitas Human Development Index (HDI) di kancah internasional.

Gebrakan peran milenial di era 4.0 menjadi penentu kualitas HDI. Pasalnya di era revolusi industri 4.0, kompetensi milenial dituntut semakin progresif. Tidak hanya peningkatan level HDI, reformasi kompetensi milenial turut merubah konteks nasionalisme gaya baru. Modernisasi nilai cinta tanah air dirasa urgent, nasionalisme perlu didudukkan pada ranah yang lebih strategis untuk mewujudkan sustainable nationalism.

Nasionalisme yang berkelanjutan merupakan bentuk internalisasi sikap cinta tanah air yang kompleks, menyeluruh, dan dinamis. Artinya, ruh dan semangat bela negara dan cinta Indonesia perlu dipahami sebagai sesuatu yang tidak hanya berhubungan dengan dimensi politis, ekonomi, sosial dan budaya, namun juga dimensi ekologis dan dimensi digital sebagai penyokong eksistensi sebuah negara. Tentu, pemahaman akan sustainable nationalism terikat pada arus transisi lintas generasi.

Setidaknya terdapat empat kualifikasi dan kompetensi milenial

yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia dan menumbuhkan semangat sustainable nationalism, meliputi (1) educational competence, kompetensi kognitif yang berbasis hard & soft skill seputar bidang keahlian tertentu; (2) ethical competence, kompetensi etis yang berwatak khas Indonesia, bersikap Pancasila, dan mampu memahami konteks cinta tanah air dari perspektif yang lebih modern serta berkelanjutan; (3) technological competence, kompetensi berbasis internet of thing sebagai basic skill yang mampu membawa perubahan strategi pembangunan, termasuk di dalamnya kompetensi industri kreatif/digital yang dapat mengukuhkan pondasi ekonomi nasional. (4) ecology and socio-cultural competence, kompetensi yang didasarkan pada endurance milenial dalam menghadapi perubahan iklim dunia, tantangan ekologis, dinamika dunia tanpa sekat, tidak gagap terhadap berbagai budaya, sanggup beradaptasi dalam global culture, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai sosial dan budaya bangsa.

Untuk mempertahankan cita rasa nasionalisme, milenial harus membaaur dalam pergaulan global, namun tetap menjaga citra diri bangsa Indonesia. Penguasaan atas keseluruhan kompetensi dapat menentukan arah pembangunan Indonesia. Harapannya, seluruh kompetensi diharapkan mampu menjadi bekal para milenial untuk menjaga keunggulan dan kualitas diri dalam memecahkan persoalan bangsa. (RED)



INDONESIA
2018
ASIAN PARA GAMES

HERACLITUS, A GREEK PHILOSOPHER ONCE SAID,
**“NOTHING ENDURES
 BUT CHANGE”**

EINSTEIN AGREED BY SAYING,
**“THE ONLY THING
 CONSTANT IN LIFE
 IS CHANGE”.**

Quotes are fancy but they are indeed meaningful in reality. We, STIA LAN Jakarta (School of Administration NIPA) believes that changes must be good and good changes are aims to achieve.

4.0 tak lagi sekedar wacana, alhasil, beragam aksi telah diupayakan oleh berbagai pihak, tak terkecuali organisasi sektor publik. Meski realita implementasi 4.0 belum sepenuhnya optimal, 4.0 menjadi fenomena yang sedang happening di ujung periode 1 pemerintahan Jokowi. Topik yang sedang booming ini tentu menjadi perhatian khusus STIA LAN Jakarta. Selain berkuat pada penyusunan agenda Grand Design Reformasi Birokrasi 4.0, kampus LAN Pejompongan ini tengah fokus mengembangkan jejaring kerjasama internasional dengan beberapa akademisi dan praktisi di luar negeri sebagai bagian dari strategi capacity building di level organisasi.

Sejak 2017, STIA LAN Jakarta sukses menggelar seminar internasional bertemakan reformasi administrasi publik bersama GMPA Graduate School of Public Administration-Seoul National University (SNU). Diskusi akademis dalam International Seminar on Public Administration Reforms mengupas dinamika modernisasi administrasi mencakup eksistensi e-governance di berbagai sektor pelayanan publik. The shifting paradigm memang telah terjadi, orientasi pelayanan kian mengarah pada derajat kepuasan publik yang berdasar pada tingkat efisiensi dan efektivitas prosedur serta kualitas produk layanan. Untuk itu, sebagai bentuk komitmen STIA LAN Jakarta dalam memperkaya literasi, tema-tema khas reformasi birokrasi dan e-governance dipilih sebagai bagian dari persiapan menyambut tren 4.0 dan transformasi digital dalam birokrasi.

Di kesempatan lain, kunjungan Guangxi Institute of Public Administration ke STIA LAN Jakarta menjadi salah satu momentum kerjasama internasional yang turut mendukung kemajuan STIA LAN Jakarta di era 4.0. Apresiasi Guangxi Institute terhadap STIA LAN Jakarta menjadi prestasi tersendiri, pasalnya, tidak hanya sebagai tuan rumah, STIA LAN Jakarta berkesempatan menjadi narasumber dalam kegiatan knowledge sharing terkait manajemen kampus dan tata kelola pelayanan publik.

STUDIUM GENERALE: E-GOVERNANCE IMPLEMENTATION INITIATIVES: TRANSFORMATION TO NEXT DIGITAL BANGLADESH



Awal tahun 2018, lagi-lagi, STIA LAN Jakarta menggelar seminar terbuka bertemakan e-governance, sebuah bahasan kekinian yang sangat relevan dengan ihwal 4.0. Tidak main-main, STIA LAN Jakarta berkolaborasi dengan National Academy for Planning and Development Bangladesh, sebuah institusi pemerintahan yang memiliki fungsi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan seperti Kementerian PPN/BAPPENAS.

Hal yang sangat prinsipal dalam event ini adalah konten studium generale yang fokus pada comparative analysis antara Indonesia dan Bangladesh. Pun, tidak hanya sarat akan kajian teoritis, ranah empiris tentang praktek e-governance dari dua Negara menjadi topik apik yang sangat menarik. Indonesia dan Bangladesh –seperti yang telah diketahui oleh semua pihak– memiliki kesamaan status sebagai Negara yang sedang berkembang. Pertukaran ide/gagasan ilmiah tentang lesson learnt dari masing-masing Negara dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan dosen STIA LAN Jakarta dalam mengkaji persoalan pembangunan di Indonesia, termasuk bagaimana reformasi tata kelola pemerintahan dapat terlaksana dengan baik.

Dibandingkan Bangladesh, Indonesia ternyata jauh lebih siap menghadapi tantangan e-world. Di awal 2010 muncul kegaduhan publik yang menyorot kegagalan pemerintah Bangladesh dalam memahami peran website dalam membangun e-governance. Banyak fakta terkait inefficiency fungsi portal online milik pemerintah, salah satunya website National Board of Revenue (NBR) atau Bangladesh Road Transport Authority (BRTA) yang ternyata masih harus melalui prosedur analog. Masyarakat masih harus mengunduh sejumlah aplikasi, mencetaknya, mengisinya dengan alat tulis dan menyerahkannya kembali ke kantor-kantor perwakilan.

Dalam prakteknya, Bangladesh memiliki tantangan birokrasi yang lebih kompleks dari Indonesia, kualitas sumber daya manusia aparatur belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan tuntutan global governance. Di lain sisi, infrastruktur menjadi tantangan utama yang kerap terkendala financial assistance.

Perjalanan panjang Bangladesh sempat dilalui oleh Indonesia di awal 2008. Realitanya, tidak hanya di Bangladesh, pasang surut perjuangan reformasi birokrasi bidang informasi teknologi membuat Indonesia berbenah, kini, Indonesia mampu menyuguhkan best practices praktek e-governance di berbagai daerah di Indonesia dan bersama-sama mendorong percepatan e-governance di Bangladesh.





ASIAN GAMES
2018 | Jakarta
Palembang

18-8-18
ENERGY OF ASIA

S A M B U T E N E R G I A S I A



PULAU PADAR,
TN KOMODO,
NUSA TENGGARA TIMUR

www.asiangames2018.id     @AsianGames2018

The 1st international conference on governance, public administration and social sciences



Public Administration and Social Science (ICoGPASS) – Towards Dynamic Governance and Sustainable Development

Tak lagi berperan sebagai co-host, STIA LAN Jakarta mantap menjadi tuan rumah The 1st International Conference on Governance, Public Administration and Social Science (ICoGPASS). Konferensi dengan multi topics yang dihadiri oleh lebih dari 200 participant dan presenter ini menjadi perhelatan akademis internasional pertama STIA LAN Jakarta di pertengahan tahun 2018. Melalui website icogpass.org.id, STIA LAN Jakarta mengundang ratusan peserta dengan beragam afiliasi. Tanpa ragu-ragu, Dr. Adrian Campbell dari School of Government and Society, University of Birmingham, UK diundang sebagai keynote speaker didampingi oleh Prof. Indra Bastian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Kedua keynote speaker memiliki absolute credibility; kualitas akademis yang tidak lagi diragukan oleh publik. Berkutat pada bahasan transformasi governance dan sustainable development, headline topic yang disampaikan oleh Dr. Campbell

tak jauh berbeda dengan upaya Indonesia dalam mendukung kondusivitas iklim inovasi pemerintahan dan reformasi birokrasi. Perbedaan konteks UK-Indonesia tak lantas membuat gap, materi dari Prof. Indra Bastian mampu menyempurnakan analisis dengan menyajikan bahasan Indonesia sentris, sebuah kajian tentang berbagai dinamika governance and development di Indonesia secara makro.

Bertempat di Grand Inna Malioboro Hotel, Yogyakarta pada 19 Juli 2018, berbagai judul karya ilmiah dipresentasikan dalam beberapa sesi. Output konferensi yang menyuguhkan layanan publikasi pada jurnal-jurnal maupun prosiding terindex Scopus menjadi pemicu ledakan antusiasme peserta. STIA LAN Jakarta memang menunjukkan komitmen serius dalam event ICoGPASS, seleksi paper cukup kompetitif, tulisan ilmiah terpilih telah ditargetkan dapat dengan mulus lulus index Scopus.

**SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS**



Tajuk utama "Towards Dynamic Governance and Sustainable Development Goals (SDGs) memang tengah menjadi sorotan para pemerhati governance dan pembangunan sejagat raya. Dynamic governance merujuk pada dinamisasi konsep pemerintahan yang selama ini dikenal statis dan hanya berdasarkan keputusan individualistik. Tantangan dalam governance sejatinya bersifat dinamis, dipengaruhi oleh banyak keputusan yang terintegrasi, melibatkan proses belajar/adaptasi yang berkelanjutan dan secara bertahap, serta membutuhkan implementasi yang tepat, karena kesuksesan sebuah negara dapat diukur melalui kualitas pemerintahannya.

Berbeda dengan dynamic governance yang masih cenderung baru, kajian sustainable development pada dasarnya telah lama menjadi tema diskusi akademis. Sejak Brundtland Report pada 1987, PBB melalui UNDP berkomitmen untuk melakukan continuous improvement pada bidang pembangunan yang ditopang oleh 3 aspek utama, yaitu ekonomi, sosio-kultural, dan lingkungan. Awal akhir 2015 segera setelah era Millenium Development Goals (MDGs) usai, 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dirintis oleh UNDP menjadi guideline baru dalam pembangunan.

Praktek SDGs bergantung pada kualitas governance suatu negara. Konsep dynamic governance yang awalnya berhasil merubah tradisi lama birokrasi Singapura telah menjadi primadona baru dalam paradigma governance.

Melalui kegiatan ini, STIA LAN Jakarta mampu menunjukkan konsistensi dan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mengelola kerjasama internasional. Rencananya, ICoGPASS menjadi agenda tahunan STIA LAN Jakarta yang dapat sustain dengan performa yang semakin baik.



Studium Generale

STIA LAN Jakarta and University of Birmingham



Public lecture atau lebih edgy dengan sebutan studium generale merupakan aktivitas rutin yang diselenggarakan oleh STIA LAN Jakarta. Kali ini, 23 Juli 2018, bertempat di gedung Makarti Bhakti Nagari, STIA LAN Jakarta sukses menjadi tuan rumah kuliah umum bertema Innovation, Effectiveness, and Policy Making in United Kingdom (UK). Antusiasme peserta terlihat sangat kentara, aula Makarti dipadati oleh lebih dari 200 orang dari beragam afiliasi. Menariknya, masih sama dengan The 1st International Conference on Governance, Public Administration and Social Science (ICoGPASS), Dr. Adrian Campbell dari University of Birmingham kembali menjadi narasumber utama yang menyajikan materi seputar dinamika inovasi governance di UK tanpa menghilangkan relevansi konsep dan praktek inovasi di Indonesia.

Tak lekang oleh waktu, dinamika inovasi selalu menjadi topik menarik dalam aktivitas akademik. Inovasi, baik bersifat inkremental maupun holistik berperan sebagai leverage dalam pembangunan dan governance. Di era disruptif, inovasi menjadi ihwal mutlak dalam birokrasi di setiap negara, tidak terkecuali UK. Dr. Campbell dengan gamblang mengupas berbagai tantangan reformasi birokrasi dan strategi inovasi pemerintah UK dalam mendukung terwujudnya dynamic governance yang didasarkan pada nilai-nilai efektivitas dan efisiensi.

Inovasi tidak lantas berdiri sendiri, istilah yang kerap dipahami sebagai kebaruan ini didukung oleh prinsip dasar efektivitas dan efisiensi. Ketiganya bermuara pada kualitas proses dan produk dari perumusan kebijakan. Di UK, praktek inovasi dan perumusan



kebijakan yang efektif dan efisien didasarkan pada prinsip-prinsip governance yang bernuanasa khas monarki. Berbeda dengan konteks lokal Indonesia, UK memiliki key principles yang melekat pada governance system. Dua prinsip dasar yang sangat kontradiktif dengan perspektif Indonesia-sentris adalah parliamentary sovereignty dan constitutional monarchy. Menariknya, unsur New Public Management menjadi salah satu penciri governance di UK. Kesatuan negara monarki ini memilih menggunakan terminologi citizen daripada community. Meskipun demikian, prinsip-prinsip umum seperti rule of law dan neutrality tetap menjadi pedoman universal dalam governance.

Bagi STIA LAN Jakarta, kuliah umum menjadi salah satu agenda ilmiah yang bersifat wajib. Forum akademis dengan mekanisme open access ini menjadi krusial bagi STIA LAN Jakarta, tidak hanya sebagai simbol eksistensi kampus di mata publik, kuliah umum memiliki peran sebagai fungsi edukasi yang melekat pada STIA LAN Jakarta.



**UNIVERSITY OF
BIRMINGHAM**

STIA LAN Jakarta and University of Birmingham



Lingkar Literasi

STIA LAN Corner

STIA LAN Corner merupakan aktivitas ilmiah rutin yang diselenggarakan oleh STIA bekerjasama dengan stakeholders dari beragam afiliasi. Digagas oleh Alih Aji Nugroho, STIA LAN Corner memiliki empat kegiatan utama, yaitu diskusi publik mengenai literasi, kelas penulisan kritis, kelas multimedia, dan kelas penelitian sosial. Harapannya, melalui STIA LAN Corner, sivitas akademika dan praktisi dapat mengembangkan kompetensi kognitif dan alur berpikir kritis birokrat guna mendukung percepatan reformasi birokrasi di era digital.

Dalam sesi perdana STIA LAN Corner, STIA LAN Jakarta berkesempatan menyambut Redaktur Eksekutif Tirto.id, Nurul Qomariyah Pramisti dan Editor in Chief Birokratmenulis.org, Rudy M. Harahap sebagai pemantik diskusi dalam event bertajuk "Kelas Literasi". Dua head director media yg sedang naik daun di kalangan milenial ini sengaja diundang untuk memberikan scientific analysis dan empirical overview tentang "mandegnya" tradisi literasi kritis di Indonesia, khususnya di kalangan Abdi Masyarakat. Diskusi ini terselenggara atas kerjasama non-profit-oriented dari STIA LAN Jakarta dengan Tirto.id dan Birokratmenulis.org. Tujuannya

sederhana, semua stakeholders memiliki willingness yang sama dan beorientasi untuk meningkatkan tradisi literasi kritis di kalangan birokrat.

Tak kalah menarik, kelas menulis dan kelas multimedia turut menjadi pusat perhatian puluhan peserta dari Kementerian/Lembaga selain LAN dan STIA LAN Jakarta. Redaktur Eksekutif Tirto.id, Nurul Qomariyah Pramisti, untuk kedua kalinya menjadi pemateri handal yang memberikan beragam materi dan trik menulis ilmiah dan konten di media cetak/elektronik. Tidak hanya berbicara seputar motivasi untuk aktif menulis, Ibu Nurul membeberkan beberapa trik jitu tentang tata kelola penulisan, beberapa diantaranya tentang fokus, angle, outline, deskripsi, dan dialog. Nyambung dengan kelas menulis, kelas multimedia menyajikan konten practical yang mampu menunjang kualitas visual sebuah karya tulis, baik ilmiah maupun sekedar coretan opini ringan. Masih digawangi oleh Tirto.ID, kelas multimedia lebih fokus pada pengembangan wawasan art dan skill penggunaan digital tools. Tema-tema updated seperti ini dirasa krusial, terlebih lagi, semarak reformasi birokrasi dan revolusi industri 4.0 sedang trending di Indonesia.





ISO 9001: 2015 UNTUK STIA LAN JAKARTA

STIA LAN Jakarta sukses memperpanjang status sertifikasi ISO 9001: 2015 pada Juli 2018. ISO 9001: 2015 merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu. Suatu lembaga/organisasi yang telah mendapatkan akreditasi (pengakuan dari pihak lain yang independen) ISO tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal manajemen penjaminan mutu produk/jasa yang dihasilkannya. Hal ini tentu berimplikasi pada perbaikan kualitas pelayanan publik dan manajemen organisasi STIA LAN Jakarta. Sebagai peraih sertifikat ISO 9001: 2015 dari SGS Indonesia System Certification, STIA LAN Jakarta berorientasi pada keberhasilan dalam pemenuhan harapan publik secara lebih efektif. Tentu, dengan standarisasi tersebut, mahasiswa sebagai penikmat layanan tidak perlu ragu akan komitmen STIA LAN Jakarta dalam mengembangkan inovasi dan perbaikan mutu pelayanan publik.



Bedah Buku Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia di Persimpangan Jalan (Prof. Oekan S. Abdoellah, MA., Ph.D)

STIA LAN Jakarta menyambut Guru Besar Universitas Padjajaran, Prof. Oekan S. Abdoellah, MA., Ph.D, penulis buku Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia di Persimpangan Jalan dalam acara Bedah Buku yang dihadiri oleh akademisi, praktisi, dan Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN RI, Dr. Muhammad Taufiq, DEA. Diskusi seputar permasalahan pembangunan, termasuk kegagalan program pembangunan akibat permainan kekuasaan, dan disparitas hasil pembangunan dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi fokus utama. Prof. Oekan, dalam buku rilisan Gramedia ini fokus pada topik pengarusutamaan model pembangunan berkelanjutan yang mengembalikan kedaulatan dalam pengelolaan dan alokasi manfaat sumber daya alam. Bisa dibilang, melalui kegiatan ini, STIA LAN Jakarta aktif menggalakkan forum literasi di kalangan sivitas akademika.

Euphoria

HUT
LAN RI
ke 61

STIA
LAN
JAKARTA

2 Agustus 2018, pagi hari di STIA LAN Jakarta nampak lebih riuh, jauh berbeda dari biasanya. Perayaan HUT LAN RI ke 61 terasa begitu meriah, pasalnya, seluruh pegawai LAN RI kompak meramaikan perlombaan voli, bulutangkis dan tenis meja di lingkungan STIA LAN Jakarta. Tak hanya lomba, halaman kampus biru-orange ini juga dihiasi berbagai atribut khas ulang tahun. Spot paling menarik adalah halaman depan gedung yang terlihat apik dengan pajangan payung hias warna pelangi. Suasana sendu terasa saat malam hari, payung dan nyala lampu memberikan pemandangan malam yang mengesankan.



Literasi Politik Menuju Tahun Demokrasi

Penulis : Bayu Mitra A. Kusuma - Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tahun 2018 telah memasuki semester kedua. Hal ini menjadi reminder bahwa tahun demokrasi telah semakin dekat. Perlu kita tekankan kembali bahwa pada tahun 2019 pemilihan umum legislatif (pileg) dan pemilihan umum presiden (pilpres) akan digelar secara serentak yang membedakannya dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan besar saat ini adalah sudah sejauh mana pengetahuan publik tentang mekanisme pemilu 2019? Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Political Marketing Consulting yang juga dijadikan acuan oleh KPU menyebutkan bahwa pada tahun 2018 semester pertama, pengetahuan publik tentang pemilu 2019 masih di bawah 50 persen.

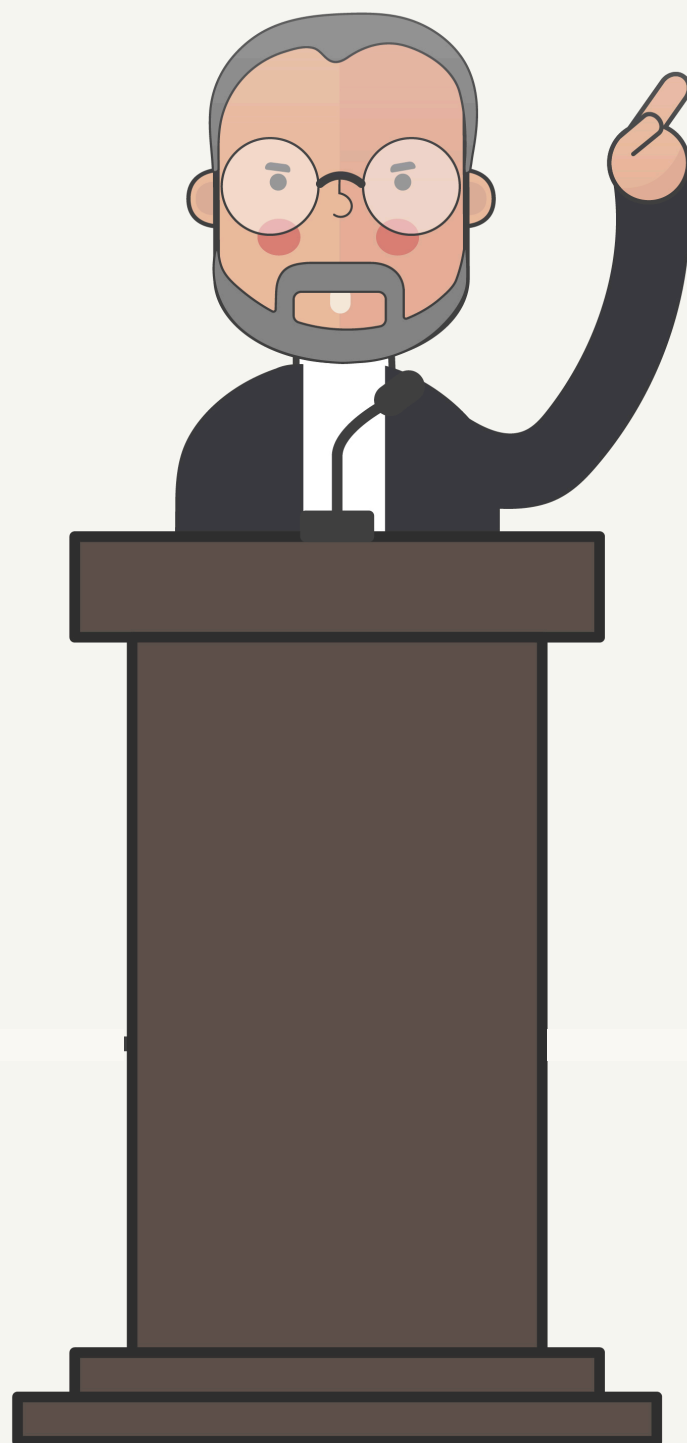
Rendahnya pengetahuan publik ini sedikit banyak terpengaruh oleh lambatnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diteken oleh pemerintah dan dilegalkan oleh DPR sehingga proses sosialisasinya pun menjadi terhambat. Apalagi menurut undang-undang yang baru ini, masa persiapan pemilu berkurang menjadi 20 bulan saja, berbeda dengan dengan Pemilu 2014 yang memiliki masa persiapan 22 bulan. Minimnya sosialisasi dan pengetahuan publik ini dapat berdampak pada meningkatnya potensi apatisme masyarakat dan semakin merebaknya ujaran kebencian yang membuat situasi menjadi tidak kondusif.

Sebagai refleksi, harus diakui bahwa sepanjang tahun 2017 adalah tahun yang cukup gaduh dengan isu-isu politik, terlebih jika isu tersebut berkelindan dengan agama dan rasial dimana akan menjadi semakin sensitif. Hal ini sebenarnya adalah masalah klasik, sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Ibnu Rusyd atau Averroes bahwa jika ingin mengerahkan massa dalam jumlah besar dan waktu yang cepat maka bungkuslah dengan isu agama. Kasus terbongkarnya sindikat Saracen juga semakin mempertegas bahwa ujaran kebencian berbau agama dan rasial sangat berpotensi untuk mempengaruhi dan meracuni hasil kontestasi politik dalam demokrasi elektoral.

Kita boleh saja selalu mengumandangkan konsep politik santun ataupun politik bermartabat. Akan tetapi hal tersebut tidaklah cukup karena faktanya sampai saat ini praktik black campaign dan money politics masih terus terjadi di berbagai penjuru negeri ini. Melihat situasi yang demikian, penting kiranya kita menggalakkan literasi politik. Literasi politik bagi masyarakat menjadi begitu strategis mengingat saat ini perbedaan atau gap akses informasi antara masyarakat perkotaan maupun pedesaan telah demikian menipis.

Di zaman yang serba digital ini, dengan sedikit memainkan jari saja berbagai pemberitaan terkait isu politik menjadi begitu mudah didapatkan oleh siapapun. Apalagi kekuatan viral melalui media sosial dan aplikasi chatting semakin mempercepat arus penetrasi informasi. Oleh karena itu nilai strategis dunia maya harus dimanfaatkan sebagai salah satu alat untuk melakukan literasi politik yang efektif. Hal ini juga untuk merubah pola pikir masyarakat yang relatif banyak terpengaruh oleh informasi dari dunia maya yang menyesatkan dan mendistorsi kondisi riil karena adanya kepentingan kelompok tertentu.

Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan literasi politik? The American Library Association mendefinisikan literasi sebagai suatu keterampilan dalam mencari, memanfaatkan,





dan mengevaluasi informasi untuk memecahkan problematika. Literasi tidak sekedar dimaknai sebagai upaya memahami sebuah teks pemberitaan, tetapi juga dalam konteks sosial yakni menumbuhkan masyarakat yang rasional, memiliki kesadaran kritis, serta mendorong partisipasi aktif dalam berbagai dinamika politik. Harapannya melalui literasi politik masyarakat dapat berperan aktif untuk mewujudkan demokrasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Literasi juga menjadi bagian penting dalam penguatan basis pengetahuan politik masyarakat, melawan apatisisme, dan melakukan kontra narasi pada ujaran kebencian. Namun perlu disadari bahwa literasi adalah konsep yang bersifat evolutif. Artinya masyarakat membutuhkan waktu dan pendampingan dalam proses penguatan kapasitas etika dan intelektual politik mereka. Pendampingan ini bukan saja menjadi tugas pemerintah - terlebih melihat kondisi saat ini dimana relasi

KPU dan Bawaslu menjadi sorotan - melainkan mejadi tugas kita bersama dalam mengawal proses perjalanan demokrasi Indonesia yang terus berbenah menuju kedewasaan. Harapannya, literasi politik yang baik dapat meningkatkan kualitas pemilu dan kembali mengulang momen epic Jokowi-Prabowo di Asian Games, tentunya nanti, di ajang pilpres 2019.

GENERASI MILLENNIAL

Pemimpin Harapan Bangsa

Penulis : Abiseka Anoraga, S.AP, M.AP - ASN STIA LAN RI



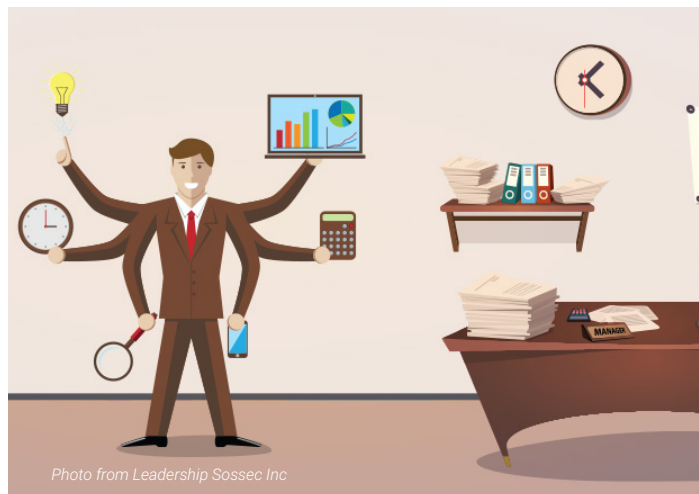
Sudah 73 tahun kemerdekaan kita rasakan dan kita semua menyadari bahwa sumbangsih pejuang terhadap kemerdekaan sangatlah besar. Mereka rela mengorbankan nyawa demi sebuah kemerdekaan bangsa. Lantas, bagaimana dengan sekarang? Negara Indonesia dibangun melalui peradaban yang sangat panjang dari jaman kerajaan hingga jaman modern bahkan sampai saat ini yang muncul dengan sebutan jaman generasi Millennial. Generasi era millennial saat ini, banyak diperbincangkan dalam berbagai tatanan elemen masyarakat. Perkembangan Generasi Millennial yang perlu beradaptasi dengan sejarah, menunjukkan bahwa primordialisme dan tradisionalisme dapat memperkuat entitas nasionalisme yang mengikuti perkembangan arus globalisasi yang ada. Indonesia yang tidak pernah luput dari perkembangan zaman yang berlandaskan sejarah maka akan dapat dengan mudah melihat serta memahami perkembangan Indonesia secara sederhana.

Hal ini tentunya menimbulkan pro dan kontra dengan banyak tampilnya tokoh-tokoh muda dalam Pemilihan Kepala Daerah maupun calon anggota legislatif 2019. Beberapa waktu belakangan intensitas pemunculan figur-figur muda yang berani menawarkan solusi masa depan bangsa di ranah publik semakin tinggi. Melihat data yang masuk ke KPU/KPUd di kabupaten kota,

banyak anak muda yang bermunculan untuk menawarkan gebrakan atau penyaluran aspirasi melalui jalur legislatif. Keberanian kaum muda untuk unjuk diri di tengah masih dominannya peran tokoh-tokoh senior di kancah politik nasional patut kita beri apresiasi positif. Kelompok muda yang mewakili generasi baru yang penuh dinamika diharapkan membawa gairah dan terobosan baru yang mampu membawa perjalanan bangsa ini menuju pintu keberhasilan, mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain. Kemunculan orang-orang muda dalam kancah politik adalah sebuah keniscayaan, tak mungkin terelakkan. Zaman terus bergerak, kaum muda tak lagi hidup dalam suatu isolemen.

Bangsa ini masih terlihat gejala seolah-olah kita masih hidup dalam dunia impian kita sendiri. Kadang-kadang terbaca atau terdengar ucapan-ucapan yang meneropong dunia luar lewat sebuah lensa yang sudah usang, sehingga bayangan kita mengenai dunia luar itu tidak serasi dengan kenyataan, hanya serasi dengan impian kita sendiri. Untuk itu pemikiran politik pemuda jaman now melihat bahwa saat ini gagasan gerakan politik dapat terkonsolidasi secara masif melalui entrepreneur, start up business, dan social entrepreneurship.

Kesadaran politisi muda untuk ikut berproses dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, baik dan modern harus didukung dengan sebaik-baiknya. Sehingga diakhir dari gerakan politik yang ada sekarang adalah Youth Government (Pemerintahan Pemuda). Kepemimpinan politik era millennial saat ini sudah mulai bermunculan dengan pemikiran-pemikiran inovatif yang modern dengan tetap berlandaskan budaya tradisional. Kepemimpinan politik dalam pemerintahan yang ada saat ini bermunculan generasi generasi milenial yang sangat kompeten dan mampu menjawab tantangan era global yang semakin berkembang. Saat perjalanan bangsa ini macet tidak seperti yang diharapkan, orang-orang mudah yang punya kewajiban memimpin barisan perubahan. Justru aneh kalau anak-anak muda kita hanya berpangku tangan, cuek, tidak mau peduli dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Pergerakan sebuah bangsa tidak pernah terlepas dari upaya dan kerja keras dari kaum mudanya. Segala kreativitas, inovasi, idealisme, dan integritasnya kian kental dalam jiwa-jiwa muda.



Sedikit menilik sejarah Indonesia, peran kaum muda kian terasa dalam membawa bangsa ini keluar dari kenistaan para penjajah. Pada 1908, muncul Kebangkitan Nasional, lalu Sumpah Pemuda (1928), Kemerdekaan Republik Indonesia (1945). Kemudian pergerakan pemuda pascakemerdekaan, Peristiwa Malari (1974), dan gerakan Reformasi (1998) yang merupakan sejumlah deretan noktah sejarah pemuda yang menjadi bagian peradaban Indonesia. Hingga saat ini, peran dari kaum muda sangat dibutuhkan meskipun dengan cara-cara dan permasalahan yang berbeda. Pengaruh kaum muda memang membawa angin segar bagi peradaban dan kemajuan bangsa ini. Di bawah kepemimpinan jiwa-jiwa muda, Indonesia mulai menemukan jati dirinya dengan mampu terbebas dari penjajah masa itu. Namun, pergerakan pascakemerdekaan terus mendidik Indonesia untuk terus dewasa melalui upaya-upaya yang dilakukan kaum muda. Dengan semangat yang begitu besar sudah selayaknya bangsa yang besar mampu menghargai dan membangun integritasnya dengan

dengan melibatkan kaum muda dalam pembangunan nasional. Beranjak dari kontribusi kaum muda dalam membangun bangsa, ada hal penting yang perlu diperhatikan bahwa kepemimpinan kaum muda yang spektakuler tidak semata-mata timbul dari dirinya.

Jadi kita patut bersyukur dengan makin bertambahnya orang-orang muda yang berani mencalonkan diri sebagai presiden, anggota DPR,



Bangsa ini masih terlihat gejala seolah-olah kita masih hidup dalam dunia impian kita sendiri. Kadang-kadang terbaca atau terdengar ucapan-ucapan yang meneropong dunia luar lewat sebuah lensa yang sudah usang, sehingga bayangan kita mengenai dunia luar itu tidak serasi dengan kenyataan, hanya serasi dengan impian kita sendiri. Pilkada merupakan tolok ukur sejauh mana sebagai sebuah bangsa yang merdeka, kaum muda daerah mampu menunjukkan prestasinya dalam berjuang membela keadilan dan menegakkan demokrasi. Dan, sebagai harapan bangsa, kaum muda mesti mengamalkan perbuatan yang positif dan konstruktif untuk memenuhi panggilan penderitaan rakyat. Iklim politik di daerah yang melalaikan hak-hak kaum muda daerah untuk berpartisipasi dalam pilkada segera dibenah. Kesadaran politisi muda untuk menuntut peran mereka dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah semestinya direspons dengan sebaik-baiknya.

Walau begitu, tidak sedikit yang memandang sinis tampilnya tokoh-tokoh muda dalam kancah politik nasional dengan berbagai alasan. Misalnya tokoh muda disebut masih minim pengalaman, idealis yang cenderung tidak realistis, mele-dakledak, kurang bijaksana dalam mengambil keputusan, dan sebagainya. Intinya, tokoh-tokoh senior masih meragukan kemampuan anak-anak muda ini jika mereka benar-benar diberi mandat oleh rakyat menjadi pemimpin nasional. Reaksi kalangan senior ini sangat manusiawi. Mungkin mereka "takut" bersaing dan tidak bisa lagi mengikuti dinamika kaum muda. Tokoh-tokoh senior yang sebagian besar telah merasakan bagaimana mendapatkan kekuasaan cenderung

ingin mempertahankan apa yang telah mereka capai. Ada rasa tidak rela kalau “anak-anak kemarin sore” yang dipercaya menjadi pemimpin nasional.

Namun, dibutuhkan perhatian, kesigapan, dorongan, dan budaya yang mendukung kepemimpinan kaum muda. Peran dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah sangat menentukan kualitas kaum muda serta akan menentukan kemajuan bangsa di masa mendatang. Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas kaum muda. Pertama, jenjang pendidikan yang ditempuh menentukan pola berpikir dari pemuda tersebut. Berdasarkan pengalaman sejarah, pergerakan nasional yang diawali dengan Kebangkitan Nasional (1908) dimulai dari pemuda terpelajar. Boedi Oetomo menjadi saksi atas pergerakan kaum muda Indonesia yang merupakan awal dari kebangkitan bangsa. Kedua, perilaku sosial yang dimiliki oleh kaum muda seperti sikap idealis, nasionalis, ideologis, dan demokratis. Sikap semacam ini akan memengaruhi pergerakan kaum muda dalam membangun bangsa.

Layaknya yang terjadi dalam gerakan Reformasi (1998), pergerakan kaum muda, khususnya mahasiswa, melakukan upaya menggulingkan pemerintahan yang otoriter. Pada masa itu, mahasiswa menuntut adanya reformasi dalam pemerintahan. Pergerakan yang dilakukan mahasiswa ketika itu dilatarbelakangi sikap demokratis. Kekuasaan negara harus ditentukan oleh rakyat, bukan penguasa dalam pemerintahan. Kepemimpinan kaum muda harus mulai dikembangkan melalui proses-proses penempaan diri dengan dukungan berbagai pihak. Yang mana akan memberikan sumbangsih kaum muda untuk terus berkarya dalam membangun bangsa. Gelora akan kepemimpinan kaum muda memang akan menemui babak baru dalam sejarah Indonesia. Pendidikan dan perilaku sosial akan memberikan dampak yang signifikan dalam menentukan arah pergerakan bangsa. Maka, kualifikasi atas kedua hal tersebut perlu diperhatikan untuk menciptakan pemuda bangsa yang berkualitas. Melalui kedua unsur itu pula diharapkan muncul generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing dalam memajukan bangsa dengan mampu menjawab berbagai tantangan global yang akhir-akhir ini semakin dirasakan oleh bangsa ini. Di masa mendatang, sudah dipastikan generasi mudalah yang akan mengemban tugas memimpin Negara, baik pada tingkat daerah



maupun nasional. Oleh karena itu, siapapun berpan-
dangan (tidak hanya kalangan intelektual, akademisi,
tetapi juga profesional) diperlukan suatu upaya yang
berkesinambungan untuk mempersiapkan pemuda
sebagai generasi-generasi penerus yang cakap dan
mumpuni serta selalu bertuturkata, bertingkahtaku
dan bertindak hendaknya sesuai dan mencerminkan
Pancasila sebagai dasar pedoman bermasyarakat
yang baik dalam sebuah Negara demi mewujudkan
suatu tatanan kehidupan kebangsaan yang sejahtera
dan berkeadilan sesuai dengan tujuan nasional yang
termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945

A photograph of a middle-aged man with grey hair, wearing a black and white batik shirt, sitting at a wooden desk. He is looking towards the camera. On the desk, there is a laptop, a mouse on a blue mousepad, and some papers. The background is a plain wall.

ETIKA DAN NETRALITAS APARATUR SIPIIL NEGARA

Penulis : Ridwan Rajab - Dosen STIA LAN Jakarta

"Bahasan ilmiah sederhana ini adalah sedikit goresan pena saya yang semoga bisa menjadi pengantar pesta demokrasi tahun 2019 bagi Aparatur Sipil Negara, guna melanjutkan pengabdian sebagai Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat."

Di pertengahan April 2019, gegap gempita pesta demokrasi di Indonesia akan menjadi panggung politik terbesar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Antusiasme masyarakat nampak begitu luar biasa. Tak heran, ajang pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden; Anggota DPR; DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota terus menjadi buah bibir khalayak ramai. Suguhan aneka informasi tersaji untuk para pemegang hak pilih –para penentu jumlah suara. Tentu, berbagai informasi berisi rayuan, janji, dan ajakan dalam bentuk program yang akan diwujudkan sebagai kue demokrasi lima tahun ke depan.

Pesta demokrasi bukan gegap gempita biasa, seluruh amunisi yang dimiliki oleh para aktor politik akan ditumpahkan dengan cara apapun, tidak hanya untuk memeriahkan, namun juga memenangkan kontestasi politik dengan berbagai cara. Publik kembali bertanya, “ASN berada pada posisi mana? Akankah hak pilih ditentukan oleh kongsi dengan para elit?

Netralitas birokrat dalam pemilu bukanlah bahasan baru. Sentilan terkait kooptasi birokrasi oleh politik ternyata justru terkesan tak lekang oleh waktu. Sejak berakhirnya masa Orde Baru hingga menjelang pemilu serentak 2019, topik netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap ramai dibicarakan.

Dalam ranah teoritis, netralitas seharusnya dipahami sebagai sikap profesional ASN yang didasarkan pada aturan hukum dan norma kepegawaian. Secara substansial, fokus UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara fokus pada peran dan fungsi PNS sebagai obyek netralitas, terlepas dari dinamisasi kegiatan politik praktis yang sarat intervensi. Perlu digarisbawahi bahwa peran PNS dalam pemerintahan selalu berkorelasi dengan banyak pihak yang berkepentingan. Jika netralitas tidak diimbangi oleh kriteria dan standar pembatasan, maka sangat dimungkinkan asas netralitas hanya menjadi slogan yang minim implementasi.

Praktek Netralitas Birokrasi

Seperti biasa saat saya berada di ruang kerja, konsumsi pertama saya adalah membaca koran Republika yang setiap pagi disiapkan oleh Pak Jono, pada kolom tertentu saya sempat membaca pemberitaan terkait sambutan Bupati (maaf tidak menyebut daerahnya) yang baru saja dilantik oleh Gubernur. Dalam sambutannya di hadapan para Aparatur Sipil Negara di daerahnya, beliau mengungkapkan:

“Saudara-saudara, saya hadir disini bersama Wakil Bupati untuk menyampaikan beberapa gagasan saya sebagaimana yang sering saya sampaikan disaat proses Pilkada. Untuk mewujudkan hal tersebut, saya berharap saudara-saudara dapat bekerja dengan baik, melayani masyarakat dan penuh dedikasi serta disiplin. Saya tidak ingin permasalahan masyarakat terabaikan, untuk itu, bekerjalah dengan baik, tidak usah memikirkan hal-hal yang menjadi kewenangan saya, yang pasti dalam beberapa waktu ke depan, saya akan mengevaluasi dan melakukan perombakan, dan bagi yang tidak mendukung saya selama ini dalam pesta demokrasi kemarin, tentu saya anggap tidak akan mendukung program saya, sehingga saya berharap untuk merenungi kembali dan jika tidak maka saya mempersilahkan saudara untuk bersiap tidak lagi dalam pemerintahan saya.”

Selanjutnya, saya jadi teringat pada Pilkada tahun 2010 Kabupaten Tangerang yang harus diulang berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, karena keterlibatan para Aparatur Sipil Negara. Memang, fenomena seperti ini bukanlah hal baru, sejak jaman Orde Lama sampai Orde Baru, pemanfaatan kekuatan Birokrasi sudah menjadi role model perilaku politik para penguasa. Hingga era Orde Baru, selama 32 tahun, para elit birokrasi seakan lupa bahwa mereka adalah jembatan antara kepentingan Negara dan Masyarakat.



Dalam perilaku etika netralitas, pengalaman saya di era Orde Baru, saat mengikuti Pelatihan Pencoblosan di Kantor LAN Perwakilan Sulawesi Selatan, yang dilaksanakan oleh Kantor wilayah Departemen Penerangan. Pelatihan tersebut wajib diikuti oleh seluruh pegawai dan para pegawai yang tidak sempat hadir diharuskan membuat laporan atas ketidak hadirannya. Singkat cerita, setelah dilakukan penjelasan sampai pencoblosan, lalu dihitung jumlah suara, ternyata ada 2 (dua) pegawai yang mencoblos selain Partai Golongan Karya (Golkar), lalu diidentifikasi oleh penyelenggara, karena rupanya surat suara sudah diberi kode. Selanjutnya saya dipanggil karena mencoblos selain Golkar. Inilah praktek pelanggaran etika yang paling memprihatinkan di eranya, karena dewa demokrasi yang mengharagai perbedaan, kebebasan dan rahasia telah dilanggar oleh penyelenggara yang juga adalah ASN.

Tentu jika kita ingin melihat keseluruhan permasalahan Birokrasi dalam kancah politik hingga saat ini, akan ditemukan begitu banyak persoalan yang berkaitan dengan netralitas, yang inti masalahnya adalah posisi Netralitas Birokrasi dalam Pesta Demokrasi. Pemanfaatan Birokrasi memang merupakan Hal yang sangat Seksi bagi Para Kompetitor politik, mereka menganggap bahwa pertarungan Politik itu sangat ditentukan oleh seberapa besar tingkat dukungan serta keterlibatan para penyelenggara negara untuk memberi kontribusi ataupun dukungan bagi mereka.

Teori Birokrasi dan Demokrasi

Membahas istilah Birokrasi, menurut Baron de Grimm pada tahun 1764 (dalam Albrow, 1970), bukanlah hal mudah. Kata sepakat terhadap istilah tersebut sampai detik ini belum diketahui, hanya saja De Gournay (dalam Albrow, 1970) pernah menulis tentang birokrasi namun belum merumuskan titik terang tentang birokrasi, karena pengistilahan yang kabur. Lalu Albrow (1970) sedikit menjelaskan bahwa dari sekian definisi tentang birokrasi, memunculkan dua istilah yang disepakati, yakni Birokrasi merupakan pemerintahan oleh para pegawai dan birokrasi merupakan suatu bentuk khusus dari organisasi.

Gournay mengemukakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh para pejabat, hal senada juga dikemukakan oleh Harold Laski (1930) dan Lasswell dan Kaplan (1950) lalu pandangan tersebut mendapat sanggahan dari Max Weber yang mengatakan bahwa sangat sulit dimengerti pendapat yang menyamakan antara sosok pejabat dan penguasa. Birokrasi akan berjalan dengan baik jika pengisian jabatan didasarkan pada kemampuan yang bisa dikriteriakan. Ujian, profesionalitas, gaji dan karir harus diatur secara pasti karena merupakan satu-satunya mata rantai personal maupun jabatan dengan orang-orang yang mengisinya.

Pernyataan Weber sebagaimana dikutip oleh Gerth dan Mill (1946) bahwa dalam kondisi normal, kekuasaan birokrasi berkembang dengan baik dan senantiasa bersifat kompleks. Dalam kondisi demikian, para politisi berbakat akan selalu menemukan posisi bagi diri mereka sendiri dalam struktur yang diisi oleh para teknokrat profesional. Sejalan dengan pendapat tersebut, Robert Merton (1952) melihat kecenderungan yang mengkhawatirkan dan terkandung dalam setiap organisasi yang memiliki kewenangan pemerintahan, yakni kecenderungan self-service dimana orang-orang yang ada di dalamnya (para aparatur) akan melayani dirinya sendiri dan mengacaukan fungsi pelayanan yang harus mereka emban, yang digambarkan oleh Grozier (1964) sebagai birokrasi dari suatu organisasi yang tidak dapat mengoreksi prilakunya sendiri, berdasarkan kesalahan yang telah dibuatnya sendiri.

Francis Rourke (1984) selanjutnya mengemukakan bahwa dalam perspektif netralitas birokrasi, cukup sulit bagi birokrasi untuk benar-benar netral, karena meskipun dalam ranah teoritis, birokrasi hanya berfungsi untuk melaksanakan kebijakan politik, namun dalam ranah praktis, birokrasi juga dapat berperan dalam membuat kebijakan politik. Selanjutnya, Rourke menjelaskan bahwa netralisasi birokrasi dari politik adalah hampir tidak mungkin, sebab jika partai tidak memberikan alternatif program pengembangan dan mobilisasi dukungan, maka birokrasi-lah yang akan melaksanakan tugas-tugas itu sendiri, serta mencari dukungan di luar partai politik yang dapat memberi dukungan bagi birokrasi dalam merumuskan kebijakan politik.



Etika Netralitas Aparatur

Dari uraian sebelumnya terkait persoalan netralitas ASN, maka untuk menjaga netralitas birokrasi, dirumuskan bahwa ASN adalah aparat profesional dengan kompetensi/karier yang handal, bermoral dan terbebas dari perilaku kolusi, korupsi maupun nepotisme. Aparatur profesional merupakan tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk memberikan pelayanan publik. Guna mewujudkan hal tersebut, dalam melaksanakan tugasnya, sosok aparatur seharusnya terhindar dari intervensi politik, dan untuk memahami langkah tersebut maka sosok Aparatur Sipil Negara harus memahami secara utuh etika sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, terlebih yang berkaitan dengan netralitas.

Dalam diri ASN telah melekat nilai-nilai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam sumpah jabatan sebagai aparat pemerintah. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa, "setiap ASN tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Menindaklanjuti amanah tersebut, KemePanRB telah mengeluarkan surat kepada para Pejabat Negara baik pusat maupun daerah tentang pelaksanaan amanah netralitas ASN.

Netralitas ASN sesungguhnya merupakan sikap seorang aparatur terkait ketidakberpihakan terhadap satu kelompok atau partai politik tertentu. Hal ini bukanlah sebuah jargon aparatur, pada konteks yang lebih mendalam, sikap netralitas harus dijadikan pedoman dalam bertindak dan berperilaku karena sebelum melaksanakan tugas, masing-masing ASN diwajibkan mengangkat sumpah yang dimulai dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa penggalan sumpah saya kutip sebagian, yang saya anggap penting untuk diingat kembali, yaitu:

"Bahwa saya akan mentaati segala perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian dan tanggungjawab". Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri saya sendiri, seseorang atau golongan".

Jelaslah bahwa disiplin etika dan sikap netral seorang ASN merupakan hal yang mutlak dan telah dituangkan dalam berbagai peraturan hukum. Bila ditemukan adanya pelanggaran etika oleh ASN, maka KemePanRB, telah menyiapkan berbagai sanksi berkaitan dengan pelanggaran oleh ASN. Untuk diingat kembali dan untuk mencegah tindakan keberpihakan ASN dalam pemilu 2019, beberapa sikap ASN yang perlu dihindari diantaranya:

- ✓ Melakukan pendekatan terhadap partai politik;
- ✓ Memasang atribut yang mempromosikan calon pemimpin daerah;
- ✓ Menghadiri deklarasi calon pemimpin daerah dengan atau tanpa atribut partai;
- ✓ Mengunggah, menanggapi, atau menyebarkan gambar maupun visi misi calon kepala daerah Melalui media sosial;
- ✓ Menjadi pembicara dalam pertemuan partai.

Kesimpulan

Genderang Pesta Demokrasi 2019 telah ditabuh dan untuk pertama kalinya akan dilakukan secara serentak, baik Pilpres, DPR, DPD, DPRD Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Tentu, seluruh energi akan dikerahkan untuk meraih simpati dan kemenangan dalam pertarungan politik. Salah satu elemen yang sangat strategis dalam memenangkan pertarungan tersebut adalah adanya dukungan para penyelenggara negara (ASN) yang dianggap sebagai aktor yang sangat dekat dengan publik. Asumsinya, kedekatan ASN dengan publik berimplikasi pada derajat kemenangan partai politik. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia telah mencatat bahwa dukungan aparatur berdampak signifikan pada tingkat kemenangan partai peserta pemilu.

Pada satu sisi, para aparatur juga tidak dapat semena-mena melibatkan diri dalam kancah pesta demokrasi karena setiap sikap dan tindakannya harus berorientasi pada kepentingan publik. Porsi intervensi ASN dalam politik telah diatur dalam banyak aturan yang membatasi bahkan melarang tindakan politis ASN. Oleh karena itu, seorang aparatur dalam pesta demokrasi, harus netral atau tidak berpihak pada kelompok tertentu namun mengayomi seluruh lapisan masyarakat.

Hal tersebut merupakan etika yang harus dijunjung tinggi oleh setiap ASN dalam menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan dan sumpah jabatan. Ingat, jangan melanggar, ada banyak sanksi yang telah disiapkan oleh K/L/D yang turut berperan dalam pembinaan dan pendayagunaan aparatur negara.



Seputar STIA LAN JAKARTA

Wawancara Eksklusif dengan Ketua STIA LAN Jakarta

Rubrik profil ditujukan untuk mengupas informasi tokoh/figur inspiratif yang tentunya dapat menjadi role model bagi semua kalangan. Namun, pada edisi perdana ini, tim STIA Blitz dengan bangga menyajikan ulasan singkat tentang profil STIA LAN Jakarta beserta serba-serbi menarik tentang STIA LAN Jakarta. Bak pepatah “tak kenal maka tak sayang”, redaktur pelaksana STIA Blitz mengajak pembaca mengenal “kampusnya para birokrat” STIA LAN Jakarta baik secara formal maupun segala serba-serbi yang tidak banyak diketahui publik. Pada Selasa siang 18 September 2018 bertempat di ruangan Ketua STIA LAN Jakarta, tim STIA Blitz mengulik beragam informasi seputar STIA LAN Jakarta dengan memandu wawancara eksklusif bersama Dr. Makhdum Priyatno, MA, Ketua STIA LAN Jakarta. Hasil interview dirasa cukup mewakili figur STIA LAN Jakarta, optimis namun tidak berlebihan. Untuk memudahkan pembaca, narasi hasil wawancara kamiemas secara deskriptif namun apik dilengkapi dengan beberapa penggalan Q & A antara STIA Blitz dan Bapak Makhdum yang tertera dalam paragraf berikut:



Dr. Makhdum Priyatno, MA



Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, Administrasi Bisnis Sektor Publik, Manajemen Keuangan Negara, dan Administrasi Pembangunan Negara.

Apa dan siapa STIA LAN Jakarta?

STIA LAN Jakarta adalah sebuah institusi pendidikan tinggi; sebuah kampus negeri di bawah LAN. Siapa STIA LAN Jakarta? Memang, tidak semua orang mengetahui. STIA LAN Jakarta didirikan pada tanggal 24 Desember 1960 berdasarkan Keputusan Menteri Pertama RI No. 578/MP/1960 dengan nama Perguruan Tinggi Dinas Ilmu Administrasi Negara (PTDIAN). Sejak pendiriannya, PTDIAN menyelenggarakan jenjang pendidikan Sarjana (Strata Satu), jurusan Ilmu Administrasi Negara. Melalui Keppres No 8 Tahun 1999 tentang LAN, STIA LAN Jakarta merupakan Sekolah Tinggi Kedinasan dalam bidang administrasi, yang keberadaannya diatur dengan Keppres No 100 Tahun 1999 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara. Saat ini, Program Studi fokus pada kajian terapan bidang

Lalu apa yang berbeda tentang STIA LAN Jakarta?

Hingga wisuda ke-54 tahun 2017, STIA LAN Jakarta berhasil mencetak lebih dari 22.000 alumni yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, bekerja di institusi pemerintah pusat maupun daerah. Kalangan birokrat tentu paham betul apa kekhasan kampus ini. Berbeda dengan masyarakat umum, gaung STIA LAN Jakarta memang belum terdengar lantang. Perbedaan yang sangat kentara adalah kategori mahasiswa yang notabene adalah para pegawai yang bekerja di institusi pemerintahan atau badan publik seperti BUMN/D. Inilah alasan mendasar mengapa STIA LAN Jakarta tidak se-famous Politeknik Keuangan Negara (PKN/STAN), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN/STPDN), dan sekolah kedinasan lain yang membuka kuliah reguler bagi mahasiswa umum. Kondisi demikian justru memberikan citra eksklusif bagi STIA LAN Jakarta, pasalnya, kampus kedinasan ini dapat menjadi kampus acuan bagi para pegawai pemerintahan yang ingin melanjutkan studi. Uniknya, banyak mahasiswa bilang “kuliah di STIA LAN Jakarta itu gampang masuknya, tapi susah keluarnya, tapi sekali keluar, langsung jadi pejabat”. Kami juga bangga, banyak Kementerian/Lembaga mengakui kualitas lulusan STIA LAN Jakarta, tidak terkecuali Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang berwenang atas penyetaraan ijazah para lulusan STIA LAN Jakarta.

Terkait komitmen untuk terus menjadi kampus unggulan di bidang terapan, bagaimana STIA menyikapi dinamika perubahan?

STIA LAN Jakarta, sebagai insitusi pendidikan yang meskipun telah memiliki sejarah panjang dan kontribusi yang relatif signifikan bagi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, memang tengah menghadapi kondisi lingkungan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, STIA LAN Jakarta diprediksi akan menghadapi perubahan lingkungan yang sangat dinamis, tidak hanya terkait public demand yang semakin tinggi, tantangan terhadap inovasi pendidikan di era revolusi industri 4.0 akan jauh lebih kompleks. Dalam hal ini, salah satu perubahan mendasar yang dilakukan oleh STIA LAN Jakarta adalah transformasi paradigma, sebuah pergantian status dari perguruan tinggi akademik menjadi perguruan tinggi terapan yang lebih fokus mengembangkan program studi terapan. Langkah strategis terkait the shifting paradigm ini dinilai menjadi bentuk respon yang paling tepat, pasalnya, STIA LAN Jakarta dituntut untuk melakukan tindakan adaptif guna memenuhi kebutuhan publik di bidang pendidikan. Untuk itu, sebagai bentuk upaya peningkatan komitmen mutu, STIA LAN Jakarta mengusung visi “Menjadi Perguruan Tinggi Unggulan dalam Bidang Administrasi Terapan”. Misi-misi pendukung visi STIA LAN Jakarta diantaranya:

- a. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Administrasi terapan yang berkualitas untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas Aparatur Negara
- b. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan inovasi yang berkualitas di bidang administrasi terapan untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
- c. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di bidang administrasi terapan agar bermanfaat bagi peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
- d. Pemberian dukungan manajemen dan teknis lainnya secara efisien, efektif, rasional, dan akuntabel untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi pada STIA LAN Jakarta
- e. Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana STIA LAN Jakarta

Dalam menjalankan misinya, STIA LAN Jakarta, sebagai sebuah organisasi sektor publik yang bergerak di bidang pendidikan memiliki peran besar dalam mengembangkan sumber daya manusia aparatur di era reformasi birokrasi 4.0. Di tengah kondisi birokrasi yang sangat dinamis, STIA LAN Jakarta berkomitmen untuk memberikan pelayanan akademis kepada para penyelenggara pemerintahan, khususnya birokrat. Berbagai inovasi kelembagaan dan perbaikan administrasi tengah dilakukan STIA LAN Jakarta sebagai wujud komitmen STIA LAN Jakarta dalam mendukung upaya governance reform di Indonesia.

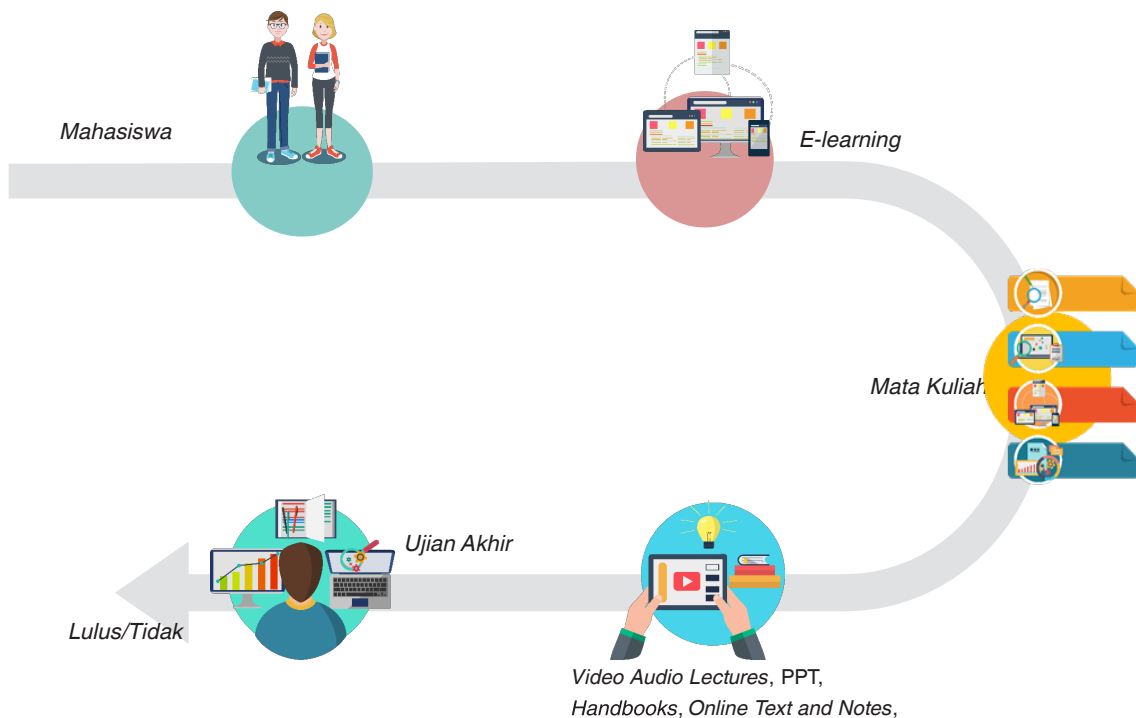
Di tengah pusaran tren Reformasi Birokrasi 4.0, bagaimana kiprah STIA LAN Jakarta?

Tentu banyak upaya yang dilakukan STIA LAN Jakarta, institusi ini bersyukur telah berhasil menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan standar ISO 9001: 2015 dari SGS. Sertifikasi ISO 9001: 2015 merupakan bagian integral dari upaya organisasi menuju tujuan yang lebih luas dari pembangunan berkelanjutan. Pencapaian ini merupakan bukti atas komitmen STIA dalam peningkatan kinerja dan prestasi organisasi. Perolehan sertifikat ini juga menjadi sebuah pengakuan terhadap kualitas pelayanan prima, kepemimpinan, dan manajemen mutu STIA LAN Jakarta yang semakin membaik. Di sisi lain, sebagai bagian dari Kemenristekdikti, STIA LAN Jakarta juga tengah mengupayakan inovasi kurikulum dan berbagai pembaharuan dalam capaian pembelajaran. Instruksi dari Kemenristekdikti harus kami laksanakan, kami beradaptasi dengan kurikulum era revolusi industri 4.0 yang memiliki pembaharuan arah orientasi untuk mendukung kualitas lulusan yang lebih kompetitif, menguasai literasi data, literasi teknologi dan literasi manusia sebagai modal dasar lulusan untuk dapat berkiprah di masyarakat.

Masih seputar pembaharuan kurikulum dan metode pembelajaran 4.0, apa yang telah dilakukan STIA LAN Jakarta?

Semua orang berpendapat bahwa saat ini adalah disruptive era. Sebuah masa dimana perubahan cepat bidang teknologi, efektivitas dan efisiensi menjadi suatu tuntutan. Mahasiswa juga dituntut mampu berpikir kritis & sistemik. STIA LAN Jakarta berupaya meningkatkan keterampilan dasar mahasiswa mencakup leadership, keterampilan bekerja dalam tim; dan kelincahan dan kematangan budaya (cultural agility), artinya, mahasiswa dengan berbagai latar belakang mampu bekerja dalam lingkungan yang berbeda.

Untuk mencetak lulusan yang terampil dan berdaya saing di tengah pergulatan digitalisasi 4.0, STIA LAN Jakarta telah mengembangkan kurikulum terapan berbasis studi tematik dari berbagai disiplin (project based-learning). Tidak hanya itu, sistem blended learning; perpaduan antara classical learning dan e-learning menjadi salah satu ujung tombak modernisasi pembelajaran era 4.0. Hal ini dilakukan untuk mendukung literasi digital, STIA LAN Jakarta.



Terakhir Pak, menurut Bapak, STIA LAN Jakarta akan menjelma seperti apa 5 tahun mendatang?

Kampus ini besar karena external and internal forces. Persoalan internal berhubungan dengan manajemen organisasi LAN dan STIA LAN Jakarta. Hadirnya 26 orang CPNS STIA LAN Jakarta tentu memberi energi baru yang dapat memberikan sumbangsih untuk STIA LAN Jakarta. Kami optimis kampus ini akan besar, sumber daya organisasi tersedia dengan sangat baik, motivasi untuk terus berinovasi juga terus dikembangkan. Sebagai informasi, Program Studi S3/Doktoral tengah dirintis, capacity building selalu ditingkatkan, termasuk pelayanan kepada mahasiswa. Faktor eksternal dapat dilihat dari dukungan alumni dan K/L/D lain melalui ikatan kerjasama. Menurut hemat saya, jika faktor-faktor tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan, tidak hanya akan survive, STIA LAN Jakarta akan mampu meningkatkan daya saingnya.

REVIEW BUKU: TROUBLED TRANSIT: ASYLUM SEEKERS STUCK IN INDONESIA

Pengarang Buku: Antje Missbach (2016, Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute)

Belakangan istilah pencari suaka dan pengungsi menjadi popular topic, bukan hanya perkara pengungsi akibat bencana nasional, namun juga pencari suaka internasional, yang secara harfiah memiliki makna berbeda dengan pengungsi. Sebenarnya, secara kontekstual, pengungsi (refugee) dan pencari suaka (asylum seeker) memiliki makna yang sama sebagai pihak yang terusir dari daerah atau negaranya karena berbagai sebab, baik bencana alam, konflik sosial, peperangan, maupun politik. Status perlindungan lah yang membedakan keduanya.

Mengacu pada Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) menjabarkan definisi pengungsi sebagai, "seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai politik tertentu, berada di luar negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut." Artinya, ketika seorang meninggalkan negara asalnya, atau tempat tinggal sebelumnya, mereka meninggalkan sebagian besar hidup, rumah, kepemilikan, dan keluarganya sehingga pengungsi tersebut tidak dapat dilindungi oleh negara asalnya karena mereka terpaksa meninggalkan negaranya. Oleh karena itu, perlindungan dan bantuan kepada mereka menjadi tanggung jawab komunitas internasional. Lalu, pencari suaka dapat dimaknai sebagai klaim oleh seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permohonan atas perlindungan belum selesai dipertimbangkan. Pencari suaka yang sedang mencari dan meminta perlindungan akan dievaluasi melalui prosedur penentuan status pengungsi.



Historically, sejak tahun 1979 Indonesia telah menerima arus pengungsi, ketika ratusan ribu pencari suaka dari Vietnam tiba dengan perahu dan ditempatkan di Pulau Galang sebelum mereka dipindahkan atau dipulangkan ke negara asal mereka. Seringkali, Indonesia menjadi titik transit utama bagi para pencari suaka yang mencari perlindungan dari konflik kemanusiaan. Tak ayal, sebagai sebuah negara transit, ada sejumlah persoalan yang musti ditangani pemerintah, terutama terkait dengan penanganan para pencari suaka tersebut. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencatat ada sekitar 13.000 pencari suaka. Mereka tersebar di sejumlah community house dan rumah detensi di penjuru daerah.

Berbagai persoalan pun mulai muncul dari kelebihan kapasitas hingga minimnya fasilitas yang diberikan kepada para pencari suaka. Sejumlah pimpinan daerah juga mulai mengeluhkan perilaku para pengungsi. Data dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) sebuah lembaga yang diberi mandat untuk melindungi dan penyelesaian pengungsi menunjukkan hingga Januari 2016 terdapat sekitar 7.169 pencari suaka. Sebagian besar pengungsi merupakan warga negara Afghanistan yakni sekitar 50%, Somalia 10%, dan Myanmar sebanyak 5%. Para forced migrants ini membawa persoalan politis di Indonesia, tentu, akar permasalahan utama adalah standing position Indonesia untuk tidak menyepakati Konvensi Pengungsi UNHCR. Hingga saat ini, ratifikasi Konvensi Pengungsi belum menjadi opsi pilihan, namun, Indonesia tetap memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pencari suaka dengan melalui kebijakan tinggal sementara.



Status Indonesia sebagai negara persinggahan menjadi konteks pokok kajian Antje Missbach tentang kehidupan dan pengelolaan migran-singhah (transit migrants) di Indonesia. Peneliti asal Jerman yang bekerja di Universitas Monash ini setidaknya sejak 2012 menerbitkan kajian-kajiannya tentang persoalan pencari suaka dan pengungsi di dunia yang kian marak dengan konflik. *Troubled Transit* merupakan etnografi yang bertempat dan beraras jamak (multisite & multilevel ethnography). Di beberapa provinsi, Antje Missbach mengunjungi rumah-rumah detensi imigrasi maupun hunian-hunian pengungsi di antara permukiman penduduk setempat, dan kawasan pantai tempat mereka mendarat atau berangkat dengan perahu penyelundup manusia. Narasumbernya 180 orang, mencakup para penyinggah (transit-migrants), agen-agen organisasi internasional pengelola migran-singhah seperti UNHCR dan IOM (International Organization for Migration), pejabat pemerintah di lembaga-lembaga yang terkait, aparat penegak hukum, pegiat LSM untuk pengungsi, dan penyelundup pengungsi. Penelitiannya menghadapi banyak tantangan metodologis, psikologis, dan etika tentang kepatutan meneliti dan memaparkan seluk-beluk kehidupan penyinggah yang kian rentan terhadap diskriminasi dan politisasi, walaupun menerapkan anonimitas orang dan tempat.

Kisah-kisah penyinggah yang membingkai analisisnya di sekujur buku, secara bertahap membangun pemahaman dan empati pembaca terhadap gejala migrasi-singhah dan para pelakunya. Bingkai utama adalah kisah Ali, pencari suaka dari Somalia, yang memperjuangkan hidup di “dunia yang semakin menyulitkan kita untuk menghindari dari tempat-tempat yang bukan tempat kita, atau gampangnya, dunia yang membuat kita semakin mudah tersesat”.

Sebagian penyinggah, termasuk penyinggah tanpa dokumen resmi yang lolos dari pemeriksaan dan penahanan (imigran gelap) tinggal tersebar di antara permukiman penduduk pribumi. Penyinggah dilarang bekerja di Indonesia, padahal bekal mereka terbatas dan biasanya merupakan utang dari handai taulan di negara asal atau di negara tujuan.

Bagi yang benar-benar miskin, ada bantuan bulanan dari lembaga-lembaga internasional, sekitar 1,25 juta rupiah per keluarga atau per kepala. Pengamat dari Indonesia mengkhawatirkan kebijakan ini akan menarik pencari suaka untuk singgah berlama-lama, dan mengundang iri hati penduduk setempat kepada “tamu tak diundang” yang “digaji” dan “dilayani”.

Kepasifan Indonesia yang tampak dari sedikit dan lemahnya perangkat hukum yang relevan untuk mengelola pengungsi. Dibandingkan Thailand dan Malaysia, jumlah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia sedikit, tak sampai 200.000. Tetapi arus pencari suaka yang meningkat ke nusantara, dan kebijakan negara ketiga yang kian membatasi penerimaan pengungsi, membuat Indonesia akhirnya harus mengambil sikap lebih tegas dalam upaya menjaga perbatasan-perbatasan wilayahnya, antara lain dengan cara memperlakukan hukum keimigrasian yang mutakhir, serta lebih aktif dalam operasi-operasi kelautan terutama untuk penyelamatan forced migrants yang mengalami kecelakaan. Terdapat banyak tantangan struktural dan masalah-masalah politis yang muncul akibat kehadiran penyinggah yang menjadi semi-menetap. Di dalam negeri, ada masalah ketaksukaan penduduk kepada pengungsi; dengan negeri lain, terutama dengan Australia, hubungan pasang-surut, terutama dalam urusan penyelundupan manusia dan ekstradisi penyelundup manusia.

Meskipun Missbach berupaya bersikap netral, di sini ia menyoroti sikap “neokolonialis Australia yang kerap mengambil dan menerapkan kebijakan sepihak. Bagi kaum pengungsi, pasang surut hubungan bilateral ini hanya menimbulkan satu akibat, yaitu, harus tinggal lebih lama lagi di Indonesia.

Missbach menunjukkan seluk beluk jejaring penyelundup-manusia, lokal maupun asing, di Indonesia, melalui tiga kasus pencari suaka yang akhirnya bergabung dalam kegiatan penyelundupan manusia yang merupakan kegiatan kriminal. Diperlihatkan keuletan dan kelenturan jejaring penyelundup manusia ini ketika berhadapan dengan penerapan hukum anti penyelundupan manusia. Para pencari suaka ini tidak mungkin berepatriasi ke negeri asal yang masih bergolak dengan konflik atau memusuhi mereka, tidak mempunyai pilihan untuk menetap di negeri ketiga yang aman, tidak bisa memasuki lapangan kerja yang sah di negeri persinggahan. Maka memasuki jejaring kriminal penyelundupan manusia sebagai pencari penumpang, menjadi makelar di antara pengungsi dan penyelundup, atau menjadi fasilitator penyelundupan pengungsi menjadi pilihan terakhir selagi mereka masih terjebak di persinggahan yang tiada berujung.

Buku ini ditutup dengan kelanjutan kisah Ali. Ia belum kunjung mendapatkan pengakuan sebagai pengungsi,

meskipun telah sampai di Australia berkat perjuangan nekadnya menyeberangi samudera Hindia dengan perahu penyelundup. Perahu yang ditumpanginya karam terlanda badai, lalu diselamatkan sekaligus ditangkap oleh Angkatan Laut Australia. Ia ditempatkan di kurungan imigrasi setahun di Pulau Natal dan kemudian di Darwin. Hukuman belum selesai, Ali hanya memperoleh visa sementara (bridging visa) yang tidak memberinya hak untuk bekerja atau belajar di Australia. Dengan kata lain, ia kembali ke status sebagai migran-singhah di negeri yang dicapainya dengan mempertaruhkan nyawa.

Missbach merujuk ungkapan peneliti lain tentang situasi hubungan antarnegara dan antarbangsa dalam konteks pengungsi ini, yakni border fetishism, pemujaan batas-batas wilayah kekuasaan, dan criminalization para forced migrants oleh pemerintah di negara-negara yang mereka lalui dan hampiri. Para forced migrants yang disebut dengan istilah yang nampak netral, irregular immigrants, kini menjadi ancaman, bahkan serbuan, bagi negara-negara tujuan, sehingga pemerintah yang bersangkutan perlu membangun benteng-benteng untuk melindungi warganya sendiri dari ancaman demikian. Konvensi internasional dan hukum yang disepakati untuk memberikan perlindungan (suaka) bagi para forced migrants, kebanyakan bersifat terlalu abstrak, sehingga sangat luas ruang bagi kompromi-kompromi yang akhirnya justru menghapuskan perlindungan akan hak-hak dasar pencari suaka dan pengungsi.

Dalam konteks Administrasi Publik, Troubled Transit merupakan karya yang komprehensif sekaligus mendalam mengenai dinamika sosio-ekonomi serta budaya dan konflik internasional, khususnya tentang fenomena migran-singhah di Indonesia dan positioning peran pemerintah sebagai policy maker. Pendekatan keagenan yang digunakannya berhasil memperlihatkan ketangguhan para penyinggah mencari hidup, tetapi juga memperlihatkan mereka sebagai agen yang terus menerus dikalahkan oleh dunia, negara persinggahan dan warganya, yang semakin tidak menyukai pengungsi. (RED)



KERENTANAN PONDASI EKONOMI NEGARA INDUSTRI PINGGIRAN DALAM KERANGKENG DISIPLIN PASAR GLOBAL

Penulis : Alih Aji Nugroho – ASN STIA LAN RI





Tren melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar sejak awal 2018 masih terus berlanjut hingga sekarang. Pekan ini, Senin (24/09/18) berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar Rupiah di pasar spot dibuka di zona merah dengan pelemahan 29 poin atau di level Rp.14.846,- per USD. Posisi Rupiah terhadap US Dollar saat ini disinyalir menjadi yang terendah dalam tiga tahun terakhir. Sontak hal ini menjadi perdebatan serius di masyarakat. Banyak kalangan menilai ini bukan masalah Rupiah yang melemah, namun posisi US Dollar sedang menguat. Pasalnya tidak hanya Indonesia, seluruh Negara di kawasan ASEAN juga mengalami hal yang sama. Bahkan menurut data Asian Development Bank (ADB), Negara-negara besar di Dunia seperti Australia, China, Singapura, dan Korea Selatan juga mengalami pelemahan kurs terhadap US Dollar.

Banyak analisa yang muncul dari berbagai pakar keuangan. Secara garis besar, menurut para ekonom arus utama masalah ini terjadi karena dua aspek kunci. Pertama, kekurangan pasokan US Dollar. Bank Sentral AS atau The Federal Reserve (The Fed) berencana menaikkan suku bunga. Peningkatannya tidak main-main, The Fed memasang tingkat Bunga yang besarnya empat kali lipat dalam waktu dua tahun belakangan. Dampak langsungnya yaitu, Negara-negara dengan utang dollar AS yang cukup besar untuk membiayai pertumbuhan atau perkembangan pun harus membayar harga yang lebih mahal untuk bunga. Akibat lain, agregat permintaan USD meningkat tajam. Di sisi lain, kondisi ekonomi di AS sejak awal 2018 menunjukkan data positif sehingga pasar menjadi bertambah yakin terhadap US Dollar. Menurut Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), terjadi fenomena super US Dollar, hal ini ditunjukkan oleh US dollar index yaitu perbandingan antara US Dollar AS dengan mata dominan di dunia (Yen, Euro, Pound, Krona, Franc, dan Dollar Kanada) terus mengalami kenaikan.

Kedua, ekspor lebih rendah dari impor. Akibat efek domino dari pertarungan dagang antara AS dan China. Menurut Menko Perekonomian, Darmin Nasution dalam paparannya dengan judul Economic Trend: Global Phenomenon and Its Implication to Indonesia yang dilansir liputan6.com (24/7/18), kekhawatiran AS terhadap perkembangan China yang begitu pesat memicu Trump membuat kebijakan yang reaksioner. AS memberlakukan tariff impor kepada para mitra dagangnya. China tidak tinggal diam dan membalas akan menaikkan bea masuk impor. Sebagai Negara dengan pangsa pasar ekspor barang modal yang cukup tinggi, kebijakan tariff impor keduanya menyebabkan pasar dunia bereaksi.

Dua analisis tersebut yang menjadi perdebatan dan diskusi arus utama di Indonesia. Namun analisis tersebut nampaknya belum mampu menjawab mengapa nilai tukar Indonesia rentan terhadap kebijakan Negara adikuasa seperti AS. Jika dilihat dari sejarah sebenarnya depresiasi nilai mata uang Indonesia (dan Negara berkembang lain) sering kali terjadi. Bahkan beberapa kali mencapai titik ekstrim seperti pada tahun 1998 dan 2008. Bahkan pada kondisi ekonomi yang menurut indikator PDB dan inflasi sedang pada posisi positif seperti sekarang ini. Badan Pusat Statistik (BPS, 2018) mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2018 sebesar 5,27 persen. Angka tersebut tumbuh lebih tinggi daripada kuartal I 2018 sebesar 5,06 persen. Ditambah lagi dengan angka inflasi yang relatif rendah dari tahun sebelumnya yaitu 0,59 persen pada Juni 2018. Bagaimana menjelaskan relasi antara pertumbuhan ekonomi yang positif di satu sisi dan melemahnya kurs mata uang di sisi yang lain? Apakah tidak ada korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dengan nilai mata uang suatu Negara? Lebih lanjut bagaimana kondisi riil ekonomi masyarakat Indonesia saat ini?





Krisis demi krisis ekonomi dengan berbagai variasi persoalan dan pemicunya secara meyakinkan menunjukkan dinamika ekonomi tak lagi koheren dengan dinamika masyarakat. Dalam bahasa Polanyi dalam bukunya *The Great Transformation* (2014) terjadi ketercerabutan analisis ekonomi dari masyarakat. Seperti dua aspek yang menjadi sorotan utama perdebatan ekonom Indonesia jika dilihat dari kacamata Polanyi hanya menyangkut aspek instrumental. Perdebatan dan analisis buntu dalam lingkaran instrumen. Belum melihat bahwa ada sistem yang bermasalah. Tulisan singkat ini berusaha memunculkan perdebatan mengenai posisi ekonomi Indonesia dalam disiplin sistem ekonomi pasar dunia.

Ekonomi Indonesia dalam disiplin pasar dunia

Berkaitan dengan posisi Indonesia terhadap ekonomi dunia, lensa analisa yang digunakan yaitu historical-geographical materialism dari David Harvey (2010). Harvey mengatakan untuk menganalisis kondisi suatu Negara harus melihat sistem ekonomi yang dipakai. Sistem ekonomi tersebut secara sederhana dapat dilihat dari relasi kontrol terhadap produksi barang sampai pada konsumsi. Serta mekanisme yang digunakan untuk pertukaran barang dan jasa. Apakah menggunakan ekonomi terencana yang demokratis atau menggunakan mekanisme pasar.

Perkembangan Industrialisasi di Indonesia jika dilihat dari sejarah tidak bisa dilepaskan dari percaturan ekonomi politik dunia. Pada era kepemimpinan Presiden Soekarno Indonesia berusaha menumbuhkan industri dalam negeri sebagai penopang ekonomi nasional. Pada era Presiden Soeharto arah kebijakan sedikit berubah dari sektor Industri menjadi fokus pada sektor pertambangan dan pertanian (Robison and Hadiz, 2006). Indonesia belum berhasil membangun industri untuk menopang ekonomi. Pondasi utama ekonomi pada masa Orde Baru adalah booming komoditas minyak (oil boom). Kian investasi yang mulai dibuka lebar pada tahun 1967 lawan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) belum menyentuh bidang manufaktur. Investasi yang masuk oleh pemerintah difokuskan pada sektor pertambangan dan selanjutnya sektor pertanian. Memang pada masa pemerintahan Presiden Soeharto harga minyak dunia sedang pada puncak kejayaan dan berhasil menjadi sumber pendapatan utama Negara (Lane, 2010). Kondisi tersebut pada satu sisi baik bagi kesehatan keuangan Negara, namun nampaknya disisi lain menjadikan pemerintah terlena menyiapkan sumber pendapatan lain. Akibatnya, industrialisasi yang mulai dibangun pada masa Orde Lama tidak berjalan pada masa Orde Baru, Hadiz (2004) menyebut Indonesia memasuki masa de-industrialisasi.

Pembangunan industri manufaktur dalam negeri mengalami "kemandegan". Produksi barang modal yang direncanakan Presiden Soekarno hasil dari nasionalisasi asset Belanda tidak berjalan. Bahkan setelah booming minyak berakhir pada tahun 1980an akhir, tidak lantas membuat industri manufaktur menjadi alternatif kebijakan pembangunan. Pemerintahan Orde Baru lebih berfokus pada pembangunan sektor pertanian atau agribisnis. Kebijakan tersebut lebih dikenal dengan sebutan revolusi hijau. Dimana terjadi penguatan penggunaan teknologi pertanian bagi petani dan intensifikasi penggunaan pupuk. Hasilnya terjadi swasembada beras pada medio 80an akhir sampai tahun 90an.





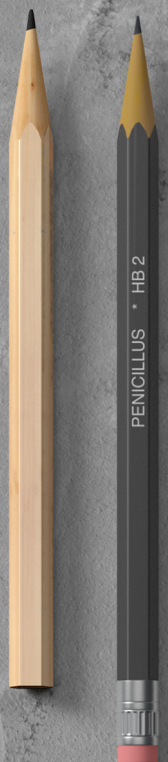
Menurut laporan Bank Dunia 2012, Transformasi dari sektor agraria menuju industri manufaktur pada awal 1990 sampai 1996 sebenarnya cukup baik. Pertumbuhan manufaktur non-migas Indonesia mencapai 12 persen per tahun dan menyumbang sepertiga dari seluruh pertumbuhan PDB riil. Bank Dunia menganggap kinerja pertumbuhan yang mengagumkan ini mempercepat transformasi Indonesia dari perekonomian agraris menjadi semi-industrialis (Hill, 1995). Bahkan Bank Dunia menggadang-gadang Indonesia sebagai "Macan Asia baru". Namun prediksi tersebut berbalik 180 derajat setelah terjadi krisis ekonomi 1997-1998. Menurut Hadiz, hal tersebut terjadi salah satunya karena industrialisasi yang terjadi pada kurun waktu 1990-1996 bertumpu pada modal asing.

Berbeda dengan industrialisasi yang direncanakan pada masa pemerintahan Orde Lama. Konfigurasi modal asing pada industrialisasi di Indonesia dibarengi dengan ekspansi perusahaan multinasional dari Negara industri maju. Perusahaan yang ada di Indonesia hanya mengerjakan sub kegiatan dari perusahaan induk. Belum ada industri nasional yang memproduksi dari barang modal sampai barang jadi. Akibatnya, jika terjadi gejolak di Negara industri maju maka Negara industri pinggiran (periferi) seperti Indonesia akan terdampak. Kondisi tersebut masih langgeng sampai saat ini. Menurut data dari Kemenperin (2018), 75 persen lebih industri manufaktur di Indonesia merupakan milik atau subordinat dari Negara industri maju. Produksi yang dilakukan di Indonesia memberikan nilai tambah yang tinggi kepada perusahaan induk di Negara industri maju. Ditambah lagi ukuran pertumbuhan ekonomi Negara di dunia menggunakan PDB sehingga menjadi lebih rawan dan problematis.

Menggugat PDB sebagai indikator utama pertumbuhan ekonomi

Selama puluhan tahun angka Produk Domestik Bruto telah mendominasi pengambilan kebijakan pembangunan sedunia. Mulai dari ruang kelas akademik, seminar-seminar pembangunan, sampai meja-meja rapat teknokrat didominasi oleh PDB sebagai indikator ekonomi. Negara-negara dunia diperingkat berdasarkan PDB, akses terhadap institusi tata kelola dunia diberikan berdasarkan pencapaian PDB (anggota G8 atau G20). Namun, apa sesungguhnya yang diukur oleh angka ini dan bagaimana sejarahnya sehingga bisa menjadi tolak ukur yang sangat berkuasa.

Krisis demi krisis telah meyakinkan banyak pihak –termasuk para ekonom dan pencipta angka ini sendiri– bahwa ada yang salah dengan cara para pengambil kebijakan memakai PDB sebagai ukuran keberhasilan. PDB terus naik seiring dengan memburuknya kualitas lingkungan dan melebarnya ketimpangan. Penggunaan PDB sebagai indikator ekonomi suatu negara mempunyai sejarah dan realitas politik yang pelik. PDB bukan merupakan rumus yang turun dari langit dan begitu saja diterapkan oleh berbagai negara untuk mengukur perekonomiannya. Penggunaan PDB merupakan hasil dari percaturan ideologi dan kepentingan sistem ekonomi-politik tertentu.

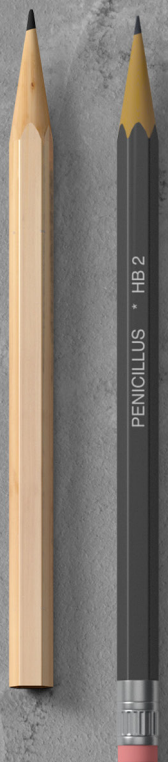




Pemikiran Kuznets sebenarnya sangatlah sederhana, “hasilkan serangkaian ukuran agregat yang mampu merangkum seluruh produksi ekonomi yang dihasilkan oleh perusahaan, dan pemerintah ke dalam satu angka tunggal, yang seharusnya naik di masa baik dan turun di masa buruk”. Singkatnya, PDB mengukur nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam rentang waktu tertentu, biasanya tiga bulan. Angka ini mengukur hasil produksi dari sudut pandang harga pasar dan bisa dilihat melalui rumus berikut: $PDB = \text{konsumsi} + \text{investasi} + \text{belanja pemerintah} + \text{ekspor} - \text{impor}$. Karena fokusnya “domestik”, PDB hanya mengukur barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu negeri, tak peduli apakah barang atau jasa tersebut diproduksi oleh perusahaan nasional atau asing. Akibatnya, sebuah perusahaan Amerika di Bekasi diperhitungkan dalam PDB Indonesia dan sebaliknya.

Selain itu, sejak diciptakan PDB telah membentuk pemahaman kita mengenai kemajuan ekonomi. PDB menjunjung dampak produksi industri yang kebanyakan tidak ekologis dan mempunyai daya destruktif yang tinggi. Terlebih lagi PDB dengan sengaja mengabaikan seluruh bobot ekonomi informal, mulai dari pekerja tak terhitung banyaknya yang dijalankan di tingkat rumah tangga sampai ke berbagai “kerja-kerja kasar” yang menafkahi jutaan orang dan sering kali justru menjadi tulang punggung perekonomian riil. Schneider dan Enste (2002) menyatakan bahwa pada 2002 terhitung 44 persen produksi di negara-negara berkembang dihasilkan oleh ekonomi informal. Di Indonesia sendiri, data pada tahun 2009 menunjukkan bahwa pekerja yang berada di sektor formal hanya 25,42% dari total angkatan kerja, dan pada saat itu pengangguran 8,14% sedangkan pekerja di sektor informal mencapai 64,9% (Habibi, 2016). Terlihat cukup naif apabila sektor yang begitu besar menyerap tenaga kerja diabaikan dari perhitungan ekonomi.

Namun nampaknya sampai sekarang angka PDB masih digunakan sebagai mesin perang yang cukup ampuh. Negara di Selatan tidak sadar bahwa sumberdayanya di serap oleh Negara Utara. Negara maju mengeksplotasi negara berkembang dan tersamarkan oleh PDB. Ekonomi Indonesia menguat padahal di dalamnya terdapat angka materi yang dimiliki oleh korporat multinasional. Akibatnya angka pertumbuhan ekonomi sebenarnya memiliki rongga menganga karena perusahaan di Indonesia membawa hasilnya dan spending money di negara asalnya.





Angka yang “Maha Kuasa”

Lorenzo Fioramonti, profesor ekonomi-politik di University of Pretoria dalam buku analisis kritisnya terhadap PDB mengatakan bahwa PDB menjadi angka yang digdaya di seluruh dunia. Keberhasilan ekonomi suatu negara diukur dengan angka tunggal. Arah kebijakan dan intervensi pemerintah terhadap negara didasarkan pada PDB. Negara-negara di dunia diurutkan berdasarkan PDB, definisi global mengenai “kuasa” dibuat berdasarkan PDB. Akses terhadap institusi tata kelola dunia pun diberikan berdasarkan pencapaian PDB, misalnya anggota G8 atau G20 diseleksi berdasarkan PDB mereka dan kebijakan pembangunan dikendalikan oleh formula PDB (Fioramonti, 2017).

Namun apakah kualitas hidup kita meningkat ketika ekonomi tumbuh sekitar 2 atau tiga persen? Dapatkan kita mengorbankan ekosistem kita hanya untuk memastikan jalannya kerangka kerja ekonomi yang dicirikan oleh inkonsistensi dan ketidakseimbangan internal? Penggunaan PDB sebagai panglima pembangunan menjadikan negara abai terhadap distribusi kekayaan. Pakar statistik Amerika W.E Deming pernah berujar bahwa dalam kasus statistika PDB, mengukur berarti menguasai. Karena dalam angka PDB terdapat penguasaan sumberdaya dari suatu negara oleh negara lain, dari satu kelas terhadap kelas lain. Penyebaran PDB ke berbagai negara berkembang bukan tanpa alasan. Angka tersebut menjadi ikon populer dan sengaja di sebarakan penggunaannya ke seluruh dunia oleh dua striker utama yaitu World Bank dan IMF. Agenda tersebut melengkapi penyebaran neoliberalisme secara global. David Harvey (2005) membedakan neoliberalisme menjadi dua dimensi. Pada aras teoretis, neoliberalisme percaya bahwa “kesejahteraan manusia dapat secara terbaik dicapai dengan membebaskan kewirausahaan dan keahlian individu dalam kerangka institusi yang ditandai oleh hak milik pribadi yang kuat, pasar bebas, dan perdagangan bebas.” Karakter institusional ini dipercaya harus dikembangkan di seluruh dunia untuk memenuhi janji-janji kebebasan individu. Aktivitas ekonomi yang diatur secara ketat oleh negara harus diregulasi dan diserahkan pengelolaannya kepada sektor swasta. Privatisasi, deregulasi, dan kompetisi diklaim mampu meningkatkan produktivitas sementara pada saat bersamaan meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya.

Peran negara utamanya hanya menciptakan dan memelihara kerangka institusional yang memadai untuk mewujudkan tujuan-tujuan di atas. Di level yang lebih konkret, negara harus menciptakan iklim investasi bagi akumulasi modal. Apa yang disebut David Harvey sebagai “negara neoliberal” ini punya misi fundamental untuk menciptakan kondisi yang diperlukan bagi akumulasi yang menguntungkan baik sebagai bagian kapital domestik maupun kapital asing (Harvey, 2005). Penggunaan PDB dalam pengukuran ekonomi hanya menguntungkan Negara-negara industri maju.





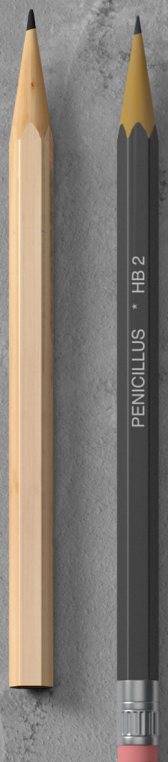
Indonesia mengimani "Angka Maha Kuasa"

Terlihat adanya PDB hanya untuk menyederhanakan kompleksitas sosial menjadi angka-angka kering, dan dengan itu, menggencarkan masyarakat pasar dengan mengabaikan kepentingan manusia, sosial, dan ekologi (Fioramonti, 2017). Dengan berpijak pada analisis kritis Fioramonti kita bisa melihat kepentingan apa yang melandasi penggunaan PDB sebagai indikator intervensi kebijakan. Kategori-kategori ekonomi seperti buruh, wiraswasta, professional, petani, atau kategori sosial seperti orang tua dan anak-anak, juga kategori politis seperti warga Negara, semuanya disamaratakan ke dalam dua "kubu": produsen dan konsumen. Mengingat bahwa pendekatan PDB hanya melihat konsumsi sebagai pendorong kemakmuran, masyarakat itu sendiri dibentuk sedemikian rupa dan kebijakan-kebijakan ekonomi dirancang untuk mendorong segala bentuk konsumerisme. PDB merupakan angka yang berusaha memastikan gerak modal dan industrialisasi berjalan lancar. Agar-angka PDB naik maka pasar harus diperkuat dengan segala cara. Penopang pasar yang utama dalam PDB yaitu sektor industri harus menjadi perhatian pemangku kebijakan. Namun pengeluaran pemerintah dalam bidang sosial misalnya menjadi terabaikan.

Kekeringan angka PDB nampak juga dalam ketidakbiasaannya menjelaskan masuknya Indonesia dalam kelompok G-20. Bagaimana bisa jika dilihat dari kondisi perekonomian (dan kesejahteraan) masyarakat secara riil, Indonesia disandingkan dengan negara-negara Uni Eropa, USA, Australia, Kanada, Tiongkok dll. Dilihat dari segi ketimpangan jelas Indonesia nomor satu dibandingkan dengan negara-negara maju tersebut. Hanya dengan mantra PDB Indonesia masuk dalam kelompok tersebut dan berusaha mengintervensi segala kebijakan ekonominya seperti negara industri maju tersebut.

Penutup

Industrialisasi yang ditopang oleh modal asing menjadikan Indonesia dan Negara-negara pinggir lain rawan terhadap pergolakan ekonomi global. Industri manufaktur yang dikembangkanpun hanya menjadi penyuplai bagian kecil dari kebutuhan barang produksi Negara industri maju. Misalnya, dari 5900 perusahaan yang ada di kawasan Industri Bekasi, hampir seluruhnya merupakan subordinat perusahaan besar di Negara industri maju. Seluruh hasil nilai tambah dari produksi industri tersebut pada akhirnya akan dibawa ke Negara asal. Celakanya, dengan menggunakan instrument PDB, nilai tambah yang dibawa ke Negara asal tersebut dihitung menjadi nilai tambah Indonesia. Sehingga secara perhitungan PDB ekonomi Indonesia meningkat, namun belum tentu secara riil ikut meningkat. Contohnya kondisi sekarang ini, nilai Rupiah terus merosot disaat pertumbuhan ekonomi (versi PDB) naik. Dibutuhkan industri manufaktur nasional yang memproduksi mulai dari barang modal sampai barang jadi agar pondasi ekonomi Indonesia kokoh. Dengan begitu ketergantungan ekonomi nasional terhadap kondisi global bisa berkurang.



MENJARING ATENSI, MENGHIDUPKAN JEJARING ALUMNI



“Untuk promosi, STIA butuh alumni”

Dr. Agus Sudrajat, MPA – Alumni STIA LAN Jakarta, Kepala Biro Perencanaan Badan Narkotika Nasional

Selasa, 9 Oktober 2018, tim redaksi STIA Blitz bersama salah satu dosen STIA LAN Jakarta, Bapak Bambang Suhartono, S.Sos., ME berkunjung ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Cawang, Jakarta Timur. Dalam kunjungan tak biasa ini, selain momen silaturahmi, sesi wawancara dengan alumni STIA LAN Jakarta menjadi agenda utama. Kampus yang awalnya dikenal sebagai PTDIAN ini layak merasa bangga memiliki alumni telah berhasil menduduki posisi strategis dalam birokrasi, tak terkecuali Bapak Dr. Agus Sudrajat, MPA, alumni Program Studi Sarjana yang kini menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan Badan Narkotika Nasional. Setelah lulus dari STIA LAN Jakarta, lulusan Magister dari Universitas ternama di Jepang ini melanjutkan studi Doktorat di Universitas Indonesia dan sukses menapaki karir struktural di BNN. Di tengah kesibukan karirnya, beliau tengah merampungkan proyek perubahan jangka menengah dan panjang hasil Diklatpim II yang salah satu outputnya adalah PerKa BNN Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Partisipatif di Lingkungan BNN. Sesuai tren reformasi

birokrasi 4.0, proses yang sedang dan akan terus dikembangkan oleh mahasiswa STIA LAN Jakarta ini menggunakan pendekatan e-governance yang meliputi e-planning, e-budgeting, e-implementation, e-money, hingga e-LAKIP. Rangkaian inovasi tersebut dimaksudkan untuk mencapai target efektivitas dan efisiensi, termasuk memangkas alur birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Bersama beliau, perbincangan santai seputar STIA LAN Jakarta era 90-an tak terasa menjadi sebuah forum diskusi kecil yang sangat menarik. Bapak Agus –sapaan akrab beliau menuturkan lika-liku STIA LAN Jakarta yang telah lama berjaya sebelum tahun 2000-an. Tak heran, di mata para birokrat, STIA LAN Jakarta menjadi salah satu pionir yang menyediakan layanan pendidikan berbasis ilmu terapan bagi para penyelenggara negara yang berbeda dengan penyelenggaraan terapan di Perguruan tinggi lainnya.

Status alumni, menurut Bapak Agus bersifat melekat pada diri setiap lulusan. Alumni memiliki sense of belonging yang dapat

menumbuhkan rasa empati dan peduli terhadap masa depan almamaternya. Terkait dengan hal tersebut, alumni memiliki 4 peran penting: (1) Alumni dapat berperan dalam memberikan masukan dan program nyata bagi kemajuan Perguruan tinggi; (2) Alumni memiliki potensi dan kompetensi dalam membangun citra Perguruan tinggi; (3) Alumni sebagai produk Perguruan tinggi dapat menjadi relasi penting untuk memperluas jejaring kerjasama antara Perguruan tinggi dengan institusi/Perguruan tinggi lainnya; (4) Alumni dapat menjadi sosok inspiratif yang memberikan motivasi serta informasi seputar dunia kerja dan usaha bagi calon lulusan/lulusan baru.

Innovator BNN ini juga menerangkan bahwa dalam hal ini, alumni memiliki posisi tawar yang unik dan strategis, karena meskipun mereka tidak lagi merupakan bagian aktif dalam proses pendidikan di Perguruan tinggi, namun pengalaman mereka selama menjadi mahasiswa dan ikatan batin serta rasa memiliki mereka yang kuat terhadap almamater dapat menghasilkan dan menawarkan berbagai konsep, ide, pemikiran, masukan dan kritik membangun yang hanya

bisa diberikan oleh orang-orang yang berada di posisi mereka.

Melalui berbagai media komunikasi, alumni STIA LAN Jakarta yang memiliki kompetensi yang mumpuni dan telah menduduki jabatan di sebuah K/L/D dapat memainkan fungsi penting dalam membangun opini publik dan menarik minat calon mahasiswa baru. Partisipasi alumni tidak melulu berkaitan dengan kegiatan akademik, tidak harus dalam format kuliah umum/studium generale, kami, alumni dapat memberikan kontribusi melalui kegiatan informal yang lebih menarik bagi khalayak, seperti Car Free Day, sosialisasi Anti Narkoba (khusus BNN), aksi peduli bencana, atau nongkrong bareng alumni, tegas Bapak Agus. Beliau juga menuturkan ide pembuatan STIA Ambassador di masing-masing wilayah kota. Ide yang diadaptasi dari berbagai kampus di luar negeri ini menyiratkan fungsi representatif tiap alumni di masing-masing K/L/D. Beliau mencontohkan penggunaan kata Chapter untuk perwakilan kader di setiap wilayah. "Kita bisa set appointment dengan alumni di Chapter Jakarta, dikoordinasi oleh Ambassador Chapter Jakarta. Bisa bersama-sama ikut Car Free Day atau

kegiatan sosial sesuai dinamika Indonesia saat ini", lanjutnya.

Pemanfaatan jejaring alumni terbukti mampu meningkatkan kredibilitas dan kiprah sebuah institusi pendidikan tinggi. Maka tidak heran, berkat dukungan KAGAMA dan ILUNI, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia bertahan di peringkat teratas sebagai top universities di Indonesia. Pembeneran atas peran dan fungsi jejaring alumni tidak lantas berdasar pada logika empiris. Teori social capital dengan gamblang menjelaskan bahwa jejaring merupakan 1 dari 3 kekuatan utama yang dapat menjadi modal pembangunan komunitas sosial. Jejaring alumni dapat memperkuat modal sosial yang dimiliki STIA LAN Jakarta dalam menjaring atensi mahasiswa baru.

Jejaring alumni, jika dikelola dengan baik, tentu tidak hanya dapat mendukung upaya promosi, postur alumni akan menunjukkan pencitraan dan kualitas sebuah almamater. "Perlu disadari bahwa ikatan alumni bukan sekedar forum silaturahmi antar alumni saja, tetapi juga wadah untuk berembuk tentang langkah strategis dalam memajukan

pencitraan dan kualitas sebuah almamater. "Perlu disadari bahwa ikatan alumni bukan sekedar forum silaturahmi antar alumni saja, tetapi juga wadah untuk berembuk tentang langkah strategis dalam memajukan almamaternya. Melihat hal tersebut, diperlukan pembinaan dan pendayagunaan ikatan alumni yang kokoh dan berkelanjutan, dan dalam hal ini, perguruan tinggilah yang memegang peranan tersebut," lanjut Bapak Agus.

Kedepannya, STIA LAN Jakarta harus peka dan aktif dalam mendayagunakan alumni. Untuk itu, perlu sebuah instrumen yang mampu menjembatani kepentingan STIA LAN Jakarta dengan aspirasi alumni, salah satunya adalah tracer study. Sistem pelacakan alumni yang lebih dikenal dengan tracer study ini memiliki fungsi utama sebagai bank data jejaring alumni. Dan hingga saat ini, STIA LAN Jakarta tengah mengembangkan tracer study berbasis web yang dapat menjadi connector alumni dengan almamater. Tentu, pelaksanaan tracer study sebaiknya juga melibatkan alumni sebagai kepanjangan tangan STIA LAN Jakarta.



Bambang Suhartono – Dosen STIA LAN Jakarta

Dr. Agus Sudrajat, MPA – Alumni STIA LAN Jakarta,
Kepala Biro Perencanaan Badan Narkotika Nasional

Saiyuli Melawan Keterbatasan





“Setiap orang memiliki kekurangan, namun tidak semua orang dapat mengubah kekurangannya menjadi kelebihan – sebuah potensi untuk terus berprestasi” – Saiyuli, Ketua Senat Mahasiswa STIA LAN Jakarta

Lenang Menggala pernah berujar, menggelorakan semangat kaum muda untuk terus belajar. Ia berkata, “berhenti menanam gusar, jadilah besar!” Senada dengan Lenang, semangat Saiyuli, Putra Daerah Bangka Belitung yang kini mengeyam pendidikan tinggi di STIA LAN Jakarta tak henti menuai prestasi. Tidak hanya unggul dalam akademik, mahasiswa milenial penerima beasiswa Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah ini kerap tampil dalam kegiatan kampus sebagai Ketua Senat Mahasiswa STIA LAN Jakarta.

Bila diperhatikan dengan seksama, kondisi fisik Saiyuli nampak berbeda, namun, hal demikian tak lantas membuatnya rendah diri – tak pernah menghalanginya untuk terus berprestasi. Terbukti, dari 80 pelamar formasi umum (jenjang SMK), Saiyuli adalah satu dari 2 pelamar yang diterima sebagai PNS Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangka Tengah bidang

Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan standar kelulusan berbasis Computer Assisted Test pada akhir 2014. Kompetensi utama di bidang keuangan membuatnya fokus memilih Program Studi (Akademik) Manajemen Keuangan Negara sebagai bekal meraih gelar Sarjana. Bagi Saiyuli, pendidikan merupakan kunci keberhasilan; Bila diperhatikan dengan seksama, kondisi fisik Saiyuli nampak berbeda, namun, hal demikian tak lantas membuatnya rendah diri – tak pernah menghalanginya untuk terus berprestasi. Terbukti, dari 80 pelamar formasi umum (jenjang SMK), Saiyuli adalah satu dari 2 pelamar yang diterima sebagai PNS Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangka Tengah bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan standar kelulusan berbasis Computer Assisted Test pada akhir 2014. Kompetensi utama di bidang keuangan membuatnya fokus memilih Program Studi (Akademik) Manajemen Keuangan Negara sebagai bekal meraih gelar Sarjana. Bagi Saiyuli, pendidikan merupakan kunci keberhasilan; peluang sukses yang terbuka bagi semua kalangan tanpa syarat kesempurnaan fisik. Sebagai PNS muda, Saiyuli optimis mampu memberikan warna pada birokrasi. Kekurangan fisik tidak membatasi aktivitasnya dalam bekerja; menggunakan komputer bahkan mengendarai motor.

Tidak sedikit generasi milenial yang terpuruk dan gagal mendulang prestasi. Figur inspiratif seperti Saiyuli tentu menjadi cerminan perjuangan kalangan milenial yang tak henti meraih mimpi. Muda, percaya diri dan berani, Saiyuli menjadi ikon mahasiswa STIA yang patut dijadikan tuntunan.



Pak Jon Setia untuk STIA

Ekspresi sumringah yang kerap dijumpai di front desk lobi STIA LAN Jakarta adalah milik Bapak Jono. Berseragam abu, coklat dan terkadang biru tua, Bapak Jono mengemban amanah sebagai petugas keamanan senior selama lebih dari 34 tahun. Tentu, beliau turut membangun image ramah STIA LAN Jakarta di depan khalayak publik. Tidak hanya mengawasi, Pak Jon -sapaan akrab beliau- memiliki tugas lain sebagai receptionist yang siap membantu para tamu dan mahasiswa STIA LAN Jakarta. “Saya disini dengan senang hati siap membantu siapapun, siapa tahu ada yang butuh informasi tentang ruang kelas, kadang ada yang tanya tentang dosen, atau keperluan lain seperti penitipan paket/barang”, ungkapnya. Bagi Pak Jon, STIA LAN Jakarta adalah rumah keduanya, puluhan tahun masa pengabdian membuat Pak Jon begitu mencintai STIA. Kepada STIA Blitz, beliau berujar seputar transformasi STIA, “dulu, orang-orang kenal kampus ini sebagai “kampusnya para birokrat”, banyak alumni yang menjadi pejabat, sekarang memang sudah banyak perubahan jaman, mahasiswa STIA dari banyak kalangan, lebih pinter-pinter, bagus buat STIA, bisa makin maju”, ujarnya sembari tertawa.

Salam dari CPNS!



8 Januari 2018, meja prasmanan dengan menu utama sayur asam dan ikan goreng telah disiapkan oleh panitia penyambutan CPNS STIA LAN Jakarta. Tak seperti biasanya, 26 orang CPNS menoreh rekor baru dalam sejarah rekrutmen CPNS STIA LAN Jakarta. Kampus ini, untuk pertama kalinya menerima rombongan calon pegawai baru terbanyak sejak pendirian STIA. “21 orang formasi dosen dan 5 orang formasi tenaga kependidikan hadir untuk berkreasi, mencetak prestasi untuk STIA LAN Jakarta”, ujar Bapak Makhdum, Ketua STIA LAN Jakarta. Bak gayung bersambut, “kami, CPNS milenial STIA siap menjadi innovator dalam segala aspek, berbagai program dan pembaharuan tengah kami kembangkan sebagai bagian dari proyek aktualisasi”, ungkap Abi, salah satu CPNS formasi dosen kepada STIA Blitz saat bersama tim redaksi.

Hal senada disampaikan oleh Dhora, CPNS formasi dosen yang sebelumnya telah menjadi dosen Ilmu Politik di Universitas Brawijaya selama 5 tahun. Mewakili para CPNS lain, Dhora sempat berujar, “memang, berbeda dengan standar pencapaian tahun-tahun sebelumnya, para CPNS, khususnya CPNS STIA LAN Jakarta wajib menuntaskan program inovasi buatan individu sebagai luaran dari rangkaian kegiatan pelatihan dasar/Latsar. Alhasil, berbagai gebrahan akademis dan non-akademis mulai dirintis, mulai dari optimalisasi laboratorium akademik, digitalisasi pelayanan kemahasiswaan, pembuatan kanal big data, videografi berbagai informasi, dan berbagai pembaharuan data akademik seperti kurikulum dan rencana pembelajaran semester”.

Tim redaksi juga sepakat, kedepannya, para CPNS siap berkiprah lebih untuk STIA, membuat STIA lebih berwarna!

ENGLISH CORNER



Slang is a new English. It's really trendy and common in England, America, Australia, New Zealand, and Ireland. Slang in English is a variety of separate languages consisting of various words and expressions. Sometimes, it doesn't sound even like English! No wonder we are even confused when we hear it. However, some of slangs are actually very expressive and meaningful. After getting to know them further, we will definitely be more uniquely fluent in conversation - when joking, for example, or when talking about a new movie just being watched.

So, Why Do People Use Slang? Slangs terkadang memberikan makna yang lebih dalam tentang sesuatu, membuat sebuah pernyataan sederhana tentang sesuatu yang (mungkin) sangat kompleks dan rumit jika dijelaskan dengan bahasa biasa. Slangs are fancy for millennials, surely slang is often a mark of being "cool" (anak gaul) or at least in the know about something modern for the time being. So, let's get to know more about some slang!



Slang in sentence!

1. Chuffed

Chuffed adalah kata sifat yang berfungsi mengungkapkan rasa senang terhadap suatu hal. Gunakan seperti dalam contoh berikut untuk menekankan betapa senangya kita.

Example: I am well chuffed about scoring a 6 in IELTS.
/ My boss is dead chuffed that I signed a big client.

(Saya senang sekali berhasil mendapat skor 6 di tes IELTS. / Bos saya amat puas karena saya berhasil mendapatkan klien besar.)

2. Taking the Mickey

Ungkapan ini mungkin pernah kita dengar di film atau seri televisi Inggris. Yang jelas, tidak ada hubungannya dengan orang bernama Mickey (atau tokoh Disney) Bentuk lengkap ungkapan ini adalah to take the Mickey out of someone, yang artinya mengolok-olok atau mengejek seseorang, dan biasanya dinyatakan sebagai kalimat tanya.

Example: I have a feeling you're being sarcastic. Are you taking the Mickey out of me?

(Sepertinya kamu menyindir. Kamu sedang mengejek saya, ya?)

3. Knackered

Inilah kata sifat yang pas digunakan untuk menggambarkan keadaan amat lelah setelah bekerja atau bersekolah sampai rasanya tak mampu melakukan apapun juga selain beristirahat. Kata ini diucapkan nackered (dengan huruf "k" disenyapkan, seperti dalam "knee"). Slang populer ini artinya kita sangat letih.

Example: I've been working overtime every day this week, so I'm absolutely knackered.

(Seminggu ini saya lembur terus menerus, jadi sekarang saya luar biasa capek.)

Slang Dictionary A-I!

All ears	Orang bodoh
Airhead	Mendengarkan dengan seksama
Ants in your pants	Groggi
At the end of your rope	Terjebak dalam situasi yang buruk
Average Joe	Orang yang mirip dengan orang lain
Back burner	Bukan masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu
Back on your feet	Baru sembuh
Back seat driver	Orang yang memberikan saran yang buruk
Bad egg	Pembuat onar
Ballpark figure	Menebak dengan baik
Barking up the wrong tree	Mencari sesuatu di tempat yang salah
Blow it	Menghilangkan atau membuang-buang sesuatu
Burnt out	Capek sekali
Cold feet	Takut
Couch potato	Orang yang duduk di depan TV seharian
Cut and dry	Sesuatu yang sudah jelas dan sudah dimengerti
Dinosaur	Sangat tua
Dry run	Masa latihan
Early bird	Orang yang bangun pagi dan langsung pergi kerja
Eat lead	Orang yang ditembak dengan senjata
Egghead	Orang pandai
Fat cat	Orang yang kaya raya
Go bananas	Hilang kendali
Go off deep end	Melakukan sesuatu yang gila
Have a screw loose	Sedikit gila
Hit the road	Meninggalkan rumah
Hit the spot	Bagus sekali!
Hole in the wall	Restoran atau toko yang kecil dan sederhana
In someone's hair	Mengganggu orang terus
In the doghouse	Dalam masalah
La la land	Tempat yang luar biasa

Selamatkan “Jekardah” dari Jelantah!

Penulis : Retnayu Prasetyanti - ASN STIA LAN Jakarta & Saiyuli - Mahasiswa STIA LAN Jakarta

Kota Jakarta yang dijuluki “Jekardah” oleh milenial masih terus berlutut dengan sampah, baik padat maupun cair. Berdasarkan data, 10 juta warga Jakarta berpotensi membuang hampir 6.5 juta liter minyak jelantah setiap bulan yang akan mengkontaminasi 6.5 milyar liter perairan. Pencemaran lingkungan –yang berkelanjutan– ini tak elak menjadi persoalan kesejahteraan yang belum paripurna, pasalnya, peradaban manusia Jakarta turut ditentukan oleh derajat kualitas lingkungan, hal ini senada dengan opini Kristanto (2002) “lingkungan memberikan pengaruh langsung terhadap kualitas kehidupan individu dan kelompok, seperti layaknya keputusan politik dan ekonomi yang kita tetapkan”.

Sampah padat, sejak rezim Jokowi-Ahok, menjadi perhatian banyak kalangan, pun menjadi salah satu fokus utama program unggulan Pemerintah Provinsi D.K.I Jakarta dalam menangani bencana banjir. Berbagai solusi telah diupayakan, termasuk pemantapan fungsi Satgas Kebersihan yang bertransformasi menjadi Pasukan Orange (Petugas Penanganan Prasarana Sarana Umum/PPSU). Track record PPSU hingga kini mendapatkan banyak pujian, kolong jembatan nampak lebih bersih, sungai dalam kota dan saluran drainase menjadi agak lebih apik.

Program *solid waste management* di Jakarta mencakup berbagai pendekatan dan strategi yang dikembangkan oleh beberapa *level stakeholders (top to bottom)*. Bank Sampah, Koperasi Sampah, dan Kampung Iklim menjadi program-program unggulan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, tidak hanya itu, program *waste to energy (WtE)* belakangan menjadi kebijakan solutif yang direncanakan akan diimplementasikan secara makro di setiap level Pemerintahan Daerah/Kota/Kab

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan energi nasional, mengamanatkan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan Diversifikasi Energi untuk meningkatkan Konservasi Sumber Daya Energi dan Ketahanan Energi Nasional dan/atau daerah dan kebijakan energi nasional merupakan kebijakan Pengelolaan Energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi Nasional. Di lain sisi, tata kelola sampah cair, salah satunya minyak bekas pakai/konsumsi belum mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, termasuk Jakarta.



Pada level Pemerintah Pusat, tidak ada legal framework yang menjadi payung hukum pengelolaan limbah sampah cair khususnya minyak jelantah. Dasar hukum pengelolaan minyak jelantah, pun, juga tidak diatur dalam Peraturan Daerah. Analoginya, jika seseorang membuang sampah padat tidak pada tempatnya, denda sebesar Rp. 500.000,- dapat dikenakan sebagai sanksi/hukuman bagi pelanggar. Hal kontras terjadi jika pelanggar membuang sampah cair berupa minyak jelantah ke kebun, selokan, atau bahkan sungai. Belum pernah ada kasus pelanggaran hukum yang dilakukan individu terkait pembuangan minyak jelantah, pun, secara umum, masyarakat tidak memiliki pemahaman dan kesadaran tentang pengelolaan minyak jelantah mencakup proses pembuangan dan pemanfaatan. Budaya illiterate masyarakat terhadap tata kelola minyak jelantah tak ayal menjadi hal lumrah yang akan terus menggerus kualitas sungai, selokan dan tanah Jakarta, tentu, dampak lebih buruk bisa terjadi jika pemerintah tidak segera mengupayakan kesepakatan politis dalam menggodok produk kebijakan.

Berapa banyak Jelantah di Jakarta ?



Lalu, dikemanakan minyak jelantah ini?



#OlahJelantah

Urgensi Tata Kelola Minyak Jelantah

Minyak jelantah mengandung senyawa-senyawa yang bersifat karsinogenik, yang terjadi selama proses penggorengan. Jelas, pemakaian minyak jelantah yang berkelanjutan dapat merusak kesehatan manusia, menimbulkan penyakit kanker. Parahnya, dalam kurun waktu tertentu (long term effect), penggunaan minyak jelantah dapat mengurangi kecerdasan generasi berikutnya. Untuk itu perlu penanganan yang tepat agar limbah minyak jelantah ini dapat bermanfaat dan tidak menimbulkan kerugian dari aspek kesehatan manusia dan lingkungan, kegunaan lain dari minyak jelantah adalah bahan bakar biodiesel.

One step ahead, beberapa organisasi profit dan non-profit memiliki concern pada pengelolaan minyak jelantah. Sebut saja belijelantah.com (CV Jelantah Life), APJETI (Asosiasi Pengumpul Minyak Jelantah untuk Energi Baru Terbarukan Indonesia),

dan Jelantah.id (PT. Biru Laut Persada), perusahaan lokal dengan dukungan perusahaan asing dari Jerman yang khusus bergerak dibidang pengumpulan limbah minyak kelapa sawit dan turunannya khususnya minyak goreng bekas atau jelantah (Used Cooking Oil – UCO) serta minyak cair limbah kelapa sawit (*Palm Oil Mill Effluent – POME*).

Harapannya, pihak non-state berperan sebagai partner pemerintah baik pusat maupun daerah dalam penyusunan Peraturan tentang Tata Kelola Penanganan Minyak Goreng Bekas atau Jelantah agar pemanfaatannya dapat sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan energi (terbarukan) nasional sekaligus mampu menjadi solusi permasalahan Bangsa Indonesia dari darurat sampah.

Dalam prakteknya, tata kelola minyak jelantah melibatkan beragam sasaran

stakeholders yaitu: (a) pabrik industri makanan, (b) hotel, (c) management restoran, (d) catering, (e) usaha penggorengan kaki lima, (f) rumah tangga, (g) pengembang perumahan, dan (h) pihak lain yang berpotensi sebagai sumber penghasil minyak goreng bekas/jelantah. Stakeholders non rumah tangga tentu memiliki mekanisme yang lebih baku dan mengikat pada Standard Operating Procedure (SOP) pemberian/perpanjangan ijin usaha. Khusus pada level industri, tata kelola minyak jelantah sewajarnya menjadi salah satu SOP pengelolaan limbah yang wajib dievaluasi oleh pemerintah. Lain halnya mekanisme tata kelola minyak jelantah pada level rumah tangga, mekanisme distribusi minyak harus dirancang dengan alur yang sangat sederhana untuk mengakomodasi derajat kesadaran masyarakat yang beragam. Sebagai contoh, dalam satu komunitas/komplek perumahan/RT, pemerintah setempat dapat menyediakan drum besar

sebagai penampung minyak sementara selama +/- 1 sampai 2 minggu hingga mencapai volume tertentu dan siap diangkut oleh truk khusus sampah minyak jelantah. Mungkin terdengar mudah dan sederhana, namun keberhasilan program ini menuntut political commitment yang kuat dari semua pihak, terutama pemerintah.

Tentu, banyak alternatif kebijakan yang dapat ditempuh, tidak hanya dimulai dari tatanan birokrasi, melalui kerjasama dengan pelaku/pengelola minyak jelantah, masyarakat dapat berpartisipasi secara signifikan mengurangi pencemaran air, mengurangi penyumbatan saluran perpipaan air, mendapatkan penghasilan tambahan,

dan mendorong pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Yap, meski aturan resmi belum terbit, mekanisme berlandas hukum belum diatur, masyarakat tetap bisa berkontribusi untuk bumi Jakarta yang bebas minyak jelantah, salah satunya adalah dengan melakukan langkah reuse.

Mata Rantai Biodiesel Minyak Jelantah



Jangan Buang Minyak Jelantah, Gunakan Untuk Ini!

Dapat menjadi Sabun Cair



Jangan salah, minyak jelantah juga dapat menjadi sabun cuci tangan. Gregorius Rio-nugroho, mahasiswa yang berasal dari Uni-versitas Diponegoro Jurusan Teknik Kimia ini mencoba membuat sabun cair menggu-nakan minyak jelantah dan abu kulit buah kapuk randu. Sabun cair didapatkan dari pencampuran minyak jelantah dengan ka-lium hidroksida yang didapatkan dari abu buah kapuk randu yang memang mengandng senyawa kalium karbonat sebesar 78,5%. Proses selanjutnya yaitu mema-naskan campuran minyak jelantah dengan kalium hidroksida hingga mencapai 110 derajat Celsius selama satu jam (proses saponifikasi). Proses ini bertujuan untuk menghasilkan sabun cair dan gliserol.



Menjadi Cairan Pembersih Lantai

Selain dapat diolah menjadi sabun cair, ternyata minyak jelantah juga dapat menjadi cairan sabun pembersih lantai. Cairan ini telah dicoba dan dibuat oleh Tim Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dan dikenal dengan nama "Karbøl Milan". Karbøl Milan ini memiliki beberapa aroma yaitu seperti jeruk nipis, apel, melati, dan bougainville. Tim Mahasiswa tersebut memanfaatkan minyak jelantah ini karena merupakan jenis limbah yang dapat mencemari lingkungan dan tidak bisa larut dalam air.

Bahan Bakar Lampu

Minyak Jelantah juga bermanfaat untuk menjadi bahan bakar lampu minyak. Tentu, pemanfaatannya terbatas pada daerah-daerah yang masih belum memiliki aliran listrik atau daerah yang sering putus listrik, pun dapat digunakan sebagai langkah precaution jika terjadi bencana. Cara membuat lampu minyak sangatlah mudah, cukup dengan menyiapkan beberapa perlengkapan yaitu wadah yang tidak mudah bocor atau tahan api dan tidak terbakar saat terkena api, kapas, dan korek api. Setelah semua perlengkapan tersedia, tuangkan minyak jelantah ke dalam wadah tersebut, lalu ambil segumpal kapas, padatkan kapas tersebut dan letakkan di tengah-tengah wadah. Tunggu hingga minyak meresap dan membasahi seluruh bagian kapas, selanjutnya, ambil korek api dan nyalakan lampu minyaknya. Jangan lupa untuk mematikan lampu minyak apabila tidak dipakai. Selalu waspada jika menggunakan api!





Menjadi Pupuk Penyubur Tanaman

Manfaat yang satu ini ditemukan oleh salah seorang pakar hortikultura yang berasal dari Australia Utara yaitu Chris Nathaniel. Pembuatan pupuk ini berasal dari pohon mangga yang terletak di sebuah pom bensin di Darwin, Australia. Merasa penasaran setelah mengamati kualitas dan kuantitas buah dari pohon mangga yang begitu banyak dan berukuran besar, Chris Nataniel mengembangkan riset dengan hipotesis yang cukup unik, asumsinya sederhana, pohon manga diduga “menyukai” bau karbon dari bensin. Berbekal rasa penasaran, Chris mulai membuat replika pupuk dari minyak sayur bekas pakai atau minyak jelantah, eksperimen tersebut membutuhkan 10 tahun, 160 kali percobaan, dan menghabiskan kurang lebih 60.000 Dollar Australia (+/- Rp. 600 juta), hanya untuk mencari campuran komposisi nutrisi yang tepat. Meski dirasa belum mendapatkan hasil yang memuaskan, Chris membuktikan bahwa pupuk penyubur hasil eksperimen mahal ini tetap dapat digunakan dengan menyemprotkannya pada tanaman. Jangan menyemprotkan terlalu banyak karena dapat menutupi pori-pori pernafasan yang ada pada permukaan daun.

Harapan terbesar dari pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel secara masif adalah munculnya varian kendaraan bertuliskan Powered by Jelantah Biodiesel. Mungkin terdengar aneh, bahkan terasa tidak mungkin, namun hal tersebut dapat terwujud dengan rekayasa ilmiah. Di kalangan scientist, minyak jelantah dapat diolah menjadi biodiesel berkualitas tinggi karena kandungan airnya rendah. Pada prinsipnya pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel adalah proses konversi trigliserida menjadi metil atau etil ester yang biasa disebut dengan transesterifikasi. Umumnya, biodiesel minyak jelantah berwarna kecoklatan dan merupakan larutan bagian atas, dan larutan bagian bawah yang berwarna hitam merupakan gliserol. Tidak asing lagi, kini banyak produsen, perusahaan swasta asing maupun dalam negeri, dan organisasi non-profit yang membidik peluang bisnis besar biodiesel minyak jelantah. Selain beberapa perusahaan yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan ini, beberapa diantaranya adalah CV. Artha Metro Oil, PT. Buatan Guna Indonesia, dan para pengepul berbasis kelompok atau individu tersebar di beberapa kota.

So, tunggu apa lagi, mari manfaatkan minyak jelantah, mari berpartisipasi demi Jakarta lebih berseri!



Menjadi Biodiesel



"A poetic snapshot of life" ★★★★★ - Total Film

POSITION AMONG THE STARS

A FILM BY
LEONARD RETEL HELMRICH

SEPUTAR FILM

dogwoof.com/position

SCARABEE FILMS presents in co-production with HUMAN BROADCASTING a film by LEONARD RETEL HELMRICH
cinematography ISMAIL FAHMI LUBISH LEONARD RETEL HELMRICH produced by HETTY NAALIKENS-RETEL HELMRICH
editor JASPER NAALIKENS sound-design RAIKO PAUKOVIC music DANANG FATURAHMAN, FAHMY AL-ATTAS
with RUMUDJAH SJAMSUDIN, BACHTIAR BECKER, THERESIA UNTARI, SRIWYATI, DIVIKOMARISAH, BAGUS NUR ALAM, TUMISAH



Stand Van De Sterren - Position among the Stars

Sutradara: Leonard Retel Helmrich

Penulis: Leonard Retel Helmrich; Hetty Naaijken-Retel Helmrich

Negara: Indonesia – Netherland

Bahasa: Indonesia

Lokasi film: Jakarta, Indonesia

Selama kurang lebih 12 tahun, pembuat film Leonard Retel Helmrich meneliti kehidupan masyarakat Indonesia dan bermukim di daerah kumuh Jakarta. Leonard telah lama fokus pada documentary film yang mengulas kritis fenomena sosial ekonomi dan kerentanan politik Indonesia. Film terakhir Leonard, *Stand van de Sterren* yang dikenal dengan judul *Position among the Stars* (2010) adalah film trilogi dari dua film sebelumnya, *Eye of The Day* atau *Stand van de Zon* (2001) dan *Shape of The Moon* atau *Stand van De Maan* (2004) meraih kesuksesan yang luar biasa hingga berhasil masuk nominasi Piala Oscar.

Dalam kisah triloginya, Sang Movie Maker terus menjaga konsistensi tema film dengan mengunggulkan cerita bergenre kritik sosial, kemiskinan, korupsi, persoalan budaya hingga konflik religi. Setahun setelah film ketiga rilis, Leonard Retel Helmrich meraih banyak penghargaan internasional seperti:

- Winner of 'Best International Documentary' IDFA 2010;
- Winner 'Special Jury Award' SUNDANCE 2011;
- Winner 'Big Stamp' ZagrebDocs 2011;
- Winner 'Special Jury Mention' Silver-docs 2011.

Trilogi Leonard memiliki dimensi cerita yang sama, objek analisis kritis yang sama, namun, setiap bagian mewakili tensenya sendiri: masa lalu, masa sekarang, dan masa depan negara. Uniknyanya, setiap film berdiri sendiri sehingga ketiga film tidak harus ditonton secara berkelanjutan. Leonard dengan cerdas menampilkan gambaran hidup sebagian besar keluarga miskin yang berjuang menyesuaikan diri dengan gejala ekonomi, sosial, politik, dan agama yang begitu kentara.



Plot dan kekhasan Leonard dalam triloginya masih terjaga. Semua film garapannya konsisten memakai metafora hewan untuk menggambarkan perilaku manusia yang hidup bersama di sebuah kampung di Jakarta; dari anak kucing yang mengantri makan dengan tikus rumah, kecoak yang mencari cara untuk menyelamatkan diri dari fogging masal, hingga hama wereng yang bertahan di dedaunan pasca penyemprotan pestisida.

Pun, inovasi Leonard bersama rekannya Willem Doevendans yang menciptakan steady wing, semacam dudukan video kamera untuk menstabilkan gambar, membuat gaya *vérité* cinema berhasil merekam scene dengan basis true events dari kehidupan sehari-hari subyek film dokumenter tanpa adanya narasi ataupun wawancara. Leonard bisa menghadirkan gambar-gambar panjang dari berbagai sisi dalam satu scene, tanpa terlalu banyak memakai cut-to-cut. Boleh dibilang, single shot scene menjadi ciri khas tersendiri film-film dokumenter Leonard. Alhasil, teknik Single Shot Scene yang sangat intim berhasil membuat kerja tim menjadi apik; tak heran, trilogi Leonard mendapatkan apresiasi internasional yang luar biasa.

Kembali pada bahasan utama, Stand Van De Sterren berkisah tentang sebuah keluarga Indonesia, "keluarga Shamsuddin" yang tinggal di area kumuh Jakarta.

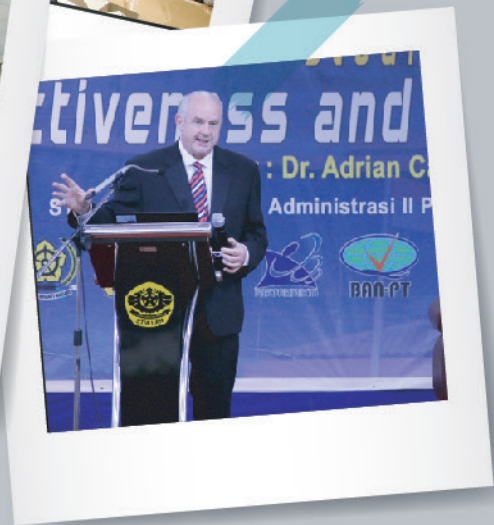
Film ini berlatarbelakang dari kunjungan Leonard ke rumah keluarga Shamsuddin pada tahun 1998. Merasa tertarik, warga negara Belanda yang berketurunan Indonesia ini memutuskan untuk mendokumentasikan kehidupan sehari-hari keluarga Shamsuddin, termasuk balada Ramidjah, nenek di keluarga itu yang beragama Kristen dan hidup di daerah kumuh di Jakarta bersama kedua putranya --yang pindah memeluk agama Islam-- serta cucu perempuanannya bernama Tari.

Pergulatan batin dalam film ini begitu kentara. Penonton diajak untuk merasakan kehidupan Jakarta yang begitu sesak. Plot yang orisinal mengangkat keseharian keluarga miskin yang terlena dengan angan-angan menjadi sejahtera, berjuang mencari kehidupan yang beradab di Ibukota, bertahan di tengah ancaman putus sekolah dan praktek pelacuran. Dalam Stand Van De Sterren, tata kelola pemerintah Indonesia digambarkan dengan penuh kontroversi, sejak orde baru hingga reformasi, berbagai gerakan anti pemerintah terus mengakar di Indonesia mulai dari isu revolusi, terorisme dan seruan jihad untuk melawan pemerintah yang menjajah bangsa sendiri.

Berkat empati sosial yang diusung, Stand Van De Sterren mampu menembus nominasi penghargaan film bergengsi dunia, Piala Oscar. Film dokumenter ini masuk nominasi Academy Award kategori film dokumenter panjang. Bagi Sineas Belanda sendiri, film ini adalah prestasi besar dalam industri perfilman Belanda. Belum pernah ada seorang sineas negeri kincir angin lolos nominasi Oscar kategori tersebut.

Film ini sangat menggugah hati, tajam mengkritisi, membangkitkan motivasi, bahkan menguji semangat nasionalisme. Olahan apik film ini memang terasa dilematis, bisa jadi memicu kontroversi yang berujung rasa malu atas tereksposnya "dapur" milik negeri, atau justru kebanggaan atas kebebasan berekspresi, demokrasi dan aspirasi yang telah berkembang pesat. Sama seperti *Slumdog Millionaire*, Stand van de Sterren memberi banyak literasi tentang dinamika kemiskinan dan gap antar kelas di perkotaan. Harapannya, melalui film ini, semua pihak menjadi lebih sadar tentang persoalan bangsa dan berkomitmen untuk berbenah, mulai dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. (RED)





STIA LAN JAKARTA MEMBUKA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN DAN MAGISTER TERAPAN BAGI ASN (PNS DAN PPPK), PEGAWAI BUMN/BUMD, TNI, POLRI

EDUCATION



PROGRAM SARJANA TERAPAN

Program Studi:

1. Administrasi Pembangunan Negara (APN), Konsentrasi:
 - a. Manajemen Pembangunan
 - b. Manajemen Kearsipan
 - c. Analisis Kebijakan
2. Administrasi Bisnis Sektor Publik (ABSP)
3. Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur (MSDMA)

STIA LAN JAKARTA MEMBUKA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN DAN MAGISTER TERAPAN BAGI ASN (PNS DAN PPPK), PEGAWAI BUMN/BUMD, TNI, POLRI

EDUCATION



PROGRAM MAGISTER TERAPAN

Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Konsentrasi:

- a. Kebijakan Pembangunan
- b. Manajemen Diklat
- c. Manajemen Sumber Daya Aparatur
- d. Manajemen Keuangan Negara
- e. Manajemen Pembangunan Daerah

STIA Blitz

SeTIA Mengedukasi



STIA ERA 4.0

STIA LAN Jakarta menerima konten berupa tulisan
OPINI, REVIEW buku atau jurnal, dan
KOLOM untuk dimuat dalam STIA Blitz. Bila berminat,
silakan menghubungi redaksi



Alamat Redaksi:

Alamat STIA LAN Jakarta: Jalan Administrasi II, Pejompongan, Jakarta Pusat

Website: stialan.ac.id

Instagram: [@stialanjakarta](https://www.instagram.com/stialanjakarta)

Facebook: STIA LAN Jakarta

Twitter: [@stialanjakarta](https://twitter.com/stialanjakarta)

Email: retnayu.prasetyanti@stialan.ac.id